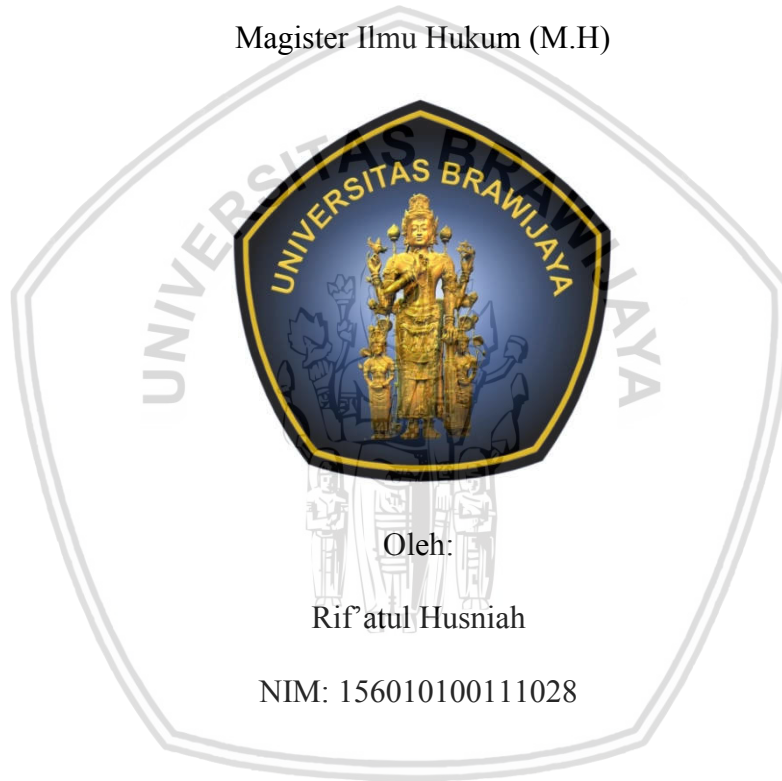


**ILLICIT ENRICHMENT SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum (M.H)



Oleh:

Rif'atul Husniah

NIM: 156010100111028

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

TESIS

Judul :

**ILLICIT ENRICHMENT SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh :

Rifatul Husniah

NIM. 156010100111028

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 16 Agustus 2017
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing

Dr. Bambang Sugiri, S.H. M.S.
Ketua

Dr. Iwan Permadi, S.H. M.Hum.
Anggota

Malang,

**Universitas Brawijaya
Pascasarjana Ilmu Hukum
Dekan**

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Istislam, S.H., M.Hum.
NIP. 19620823 198601 1 002

Identitas Penguji

1. Dr. Ismail Navianto,SH., MH. (Penguji I)
2. Dr. Abdul Madjid, SH. MHum (Penguji II)



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 16 Agustus 2017
Mahasiswa



Nama : Rif'atul Husniah
Nim : 156010100111028
PS : Magister Ilmu Hukum
FH UB

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Rif'atul Husniah

Tempat,tanggal lahir : Marabahan, 4 April 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Perum Taman Permata Indah AC.9 RT.3 RW.4, Pagak,
Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

Nama Ayah : Drs. M. Yuliani

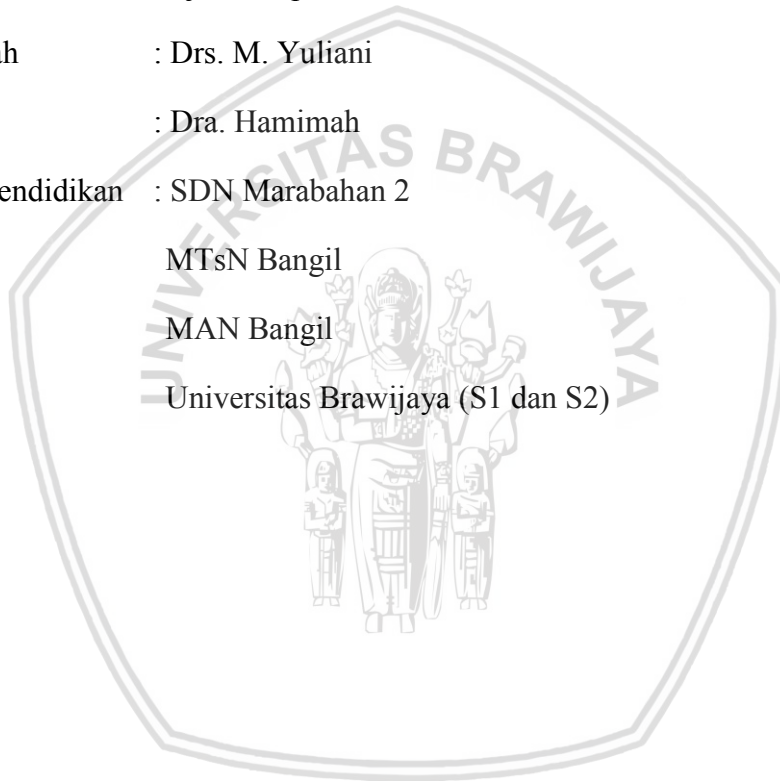
Nama Ibu : Dra. Hamimah

Riwayat Pendidikan : SDN Marabahan 2

MTsN Bangil

MAN Bangil

Universitas Brawijaya (S1 dan S2)



Ucapan Terima Kasih

1. Terima kasih kepada Allah swt yang telah melancarkan jalannya pembuatan tesis ini.
2. Terima kasih untuk Mama dan Abah yang tiada henti mendoakan dan memberikan dukungan selalu.
3. Terima kasih Tri Satyo Nugroho yang selalu mendoakan, memberikan nasihat dan mendengarkan segala keluh kesah penulis selama mengerjakan Tesis ini.
♥♥♥
4. Terima kasih buat Ditadis, Mba Cha dan Mba Ninda yang selama ini membantu dan juga menemani penulis dalam mengerjakan Tesis ini. Semoga meskipun jauh silaturahmi tetap terjaga sholehah.
5. Terimakasih Rara dan Nisa teman kos terkece yang membantu penulis baik semangat maupun doanya.
6. Terimakasih buat SevenHo alias Mae, Mak (Leny), Oji, Lely, Njek dan Aisyah atas doa dan semangat yang kalian berikan semoga persahabatan kita tetap terjaga selamanya.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya Tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.

Ringkasan

Rif'atul Husniah, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2017, *Illicit Enrichment* Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.S, Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.Hum.

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai *illicit enrichment* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. *Illicit enrichment* sendiri diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006, karena undang-undang tersebut hanyalah untuk mengesahkan saja maka dibutuhkan suatu peraturan perundangan tersendiri untuk mengimplementasikannya bisa dengan membuat Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang yang sudah ada saat ini. Namun sampai saat ini *illicit enrichment* belum diatur dalam hukum positif di Indonesia sehingga terjadi kekosongan hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat 3 rumusan masalah yaitu: (1) Apa ide dasar dari *Illicit Enrichment* sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia? (2) Mengapa *Illicit Enrichment* perlu dimasukkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? (3) Bagaimana formulasi pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* di Indonesia dimasa yang akan datang?

Metode penelitian yang digunakan yaitu: jenis penelitiannya adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan, dianalisis menggunakan teknik analisis intepretasi sistematis dan intepretasi gramatikal.

Hasil penelitan yang didapat dalam penelitan ini yang pertama, ide dasar dari *illicit enrichment* dapat dilihat dari 3 landasan yaitu landasan yuridis, filosofis dan sosiologis yang intinya bahwa *illicit enrichment* merupakan suatu upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, *Illicit Enrichment* perlu dimasukkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi karena *illicit enrichment* memiliki banyak keunggulan sebagai upaya pemberantasan korupsi terutama dalam mengembalikan aset negara. Ketiga, Belum adanya pengaturan mengenai *illicit enrichment* berakibat adanya kekosongan hukum maka dibutuhkan suatu pengaturan hukum terkait *illicit enrichment*, penulis juga memberikan rekomendasi formulasi hukum *illicit enrichment*. Saran bagi pemerintah untuk segera membuat peraturan terkait *illicit enrichment* beserta faktor pendukungnya, bagi pejabat publik untuk secara berkala melaporkan harta kekayaannya untuk menghindari kecurigaan kekayaan diperoleh dari penghasilan tidak sah dan menghindari tindak pidana korupsi, dan bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap pejabat publik.

SUMMARY

Rif'atul Husniah, Master Degree of Law Science Major, Law Faculty of Brawijaya University, July 2017. Illicit Enrichment as an Effort to Eradicate the Corruption Acts in Indonesia, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Dr. Iwan Permadi, S.H., M. Hum.

In this research, the researcher discussed the topic regarding Illicit Enrichment as an effort to eradicate the corruption acts in Indonesia. The Illicit Enrichment itself is administered within the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) in 2003 which was ratified in Indonesia in a form of UU No. 7 Th. 2006. Since the constitution itself is used only for the validating purpose, there is a need to make a separate regulations to implement this act within the country, either by making a new constitution or revising the existing one. However, until this day Illicit Enrichment still has not been administered by positive law in Indonesia so that there's an emptiness of law regarding this matter. Based on these facts, the researcher concludes that there are three problems for this research such as: (1) what's the main idea of Illicit Enrichment as an effort to eradicate the corruption acts in Indonesia? (2) Why is Illicit Enrichment necessary to be put in the constitution as an effort to eradicate the corruption acts? (3) How is the formulation of regulation regarding Illicit Enrichment in Indonesia in the future?

The research method used in this thesis consists of: juridical normative as the type of research by using the constitutional approach, conceptual approach and comparative approach, with the analysis method used consists of systematic interpretation analysis method and grammatical interpretation analysis method.

Based on the result of this research, the researcher concludes that: (1) the main idea of Illicit Enrichment can be seen from 3 base that is juridical, philosophical and sociological basis essentially that illicit enrichment is an effort to eradicate corruption crime (2) Illicit Enrichment needs to be put as an effort to eradicate the corruption acts because Illicit Enrichment has so many benefits for its purpose as an effort to eradicate the corruption acts especially in order to return the public's assets (3) there is still no regulation regarding Illicit Enrichment, causing the emptiness of law within the country. Based on this fact, there is a need of regulation regarding Illicit Enrichment. The researcher also recommends the formulation of law regarding Illicit Enrichment. Advice for the government is to make a regulation immediately regarding Illicit Enrichment along with the supporting factors for the public officials to frequently report their wealth in order to avoid the suspicion of illegitimate source of wealth and also to avoid corruption acts. And also there's another advice for society to involve in this matter by doing social control to public officials.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya tesis ini.

Terimakasihpenulissampaikankepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Istislam, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.S selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas bimbingan, kesabaran dan motivasinya selama ini.
4. Bapak Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya.
5. Drs H. M. Yuliani dan Dra. Hj. Hamimah selaku orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan doa yang tidak pernah putus.

Tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikakan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki Tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juni 2017

Penulis

Rif'atul Husniah

Daftar Isi

| | |
|--|--------------|
| Halaman Pengesahan | ii |
| Ringkasan..... | iii |
| <i>Summary</i> | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi..... | vii |
| Daftar Tabel | viii |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3. Tujuan Penulisan..... | 10 |
| 1.4. Manfaat Penulisan..... | 11 |
| 1.5. Kerangka Teoritik | 12 |
| 1.5.1. Teori Kebijakan Hukum Pidana..... | 12 |
| 1.5.2. Teori Tujuan Hukum..... | 17 |
| 1.5.3. Teori Pemidanaan..... | 23 |
| 1.6. Metode Penelitian..... | 28 |
| 1.6.1. Jenis Penelitian..... | 28 |
| 1.6.2. Pendekatan Penelitian | 28 |
| 1.6.3. Sumber Bahan Hukum | 29 |
| 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 31 |
| 1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 31 |
| 1.7. Sistematika Penulisan | 32 |
| BAB II Kajian Pustaka..... | 34 |
| 1.1. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Korupsi | 34 |
| 1.1.1. Tindak Pidana Korupsi..... | 34 |
| 1.1.2. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi.. | 39 |
| 1.2. Kajian Umum <i>Illicit Enrichment</i> | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 1.2.1. Pengaturan <i>Illicit Enrichment</i> dalam <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)</i> | 41 |
| 1.2.2. Pengaturan <i>Illicit Enrichment</i> di beberapa Negara | 49 |
| BAB III Hasil dan Pembahasan | 56 |
| 1.1. Ide Dasar <i>Illicit enrichment</i> | 56 |
| 1.2. Perlunya Pengaturan <i>Illicit enrichment</i> Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia..... | 68 |
| 1.3. Formulasi Pengaturan <i>Illicit Enrichment</i> di Indonesia dimasa yang akan datang..... | 85 |
| BAB IV PENUTUP | 98 |
| 1.1. Kesimpulan..... | 98 |
| 1.2. Saran | 99 |
| Daftar Pustaka | 101 |



Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu | 9 |
| Tabel 2.1 Perbedaan <i>Illicit Enrichment</i> dengan <i>Unexplained Wealth</i> | 44 |
| Tabel 2.2 Beberapa Peraturan Perundangan yang Mengatur <i>Illicit Enrichment</i> | 50 |
| Tabel 2.3 Perbandingan Tiga Konvensi yang Mengatur <i>Illicit Enrichment</i> .. | 52 |
| Tabel 3.1 Perbandingan RUU Perampasan Aset dan RUU Tipikor..... | 72 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, seperti yang disebutkan dalam konstitusi negara yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, maka setiap tindakan pemerintah maupun tindakan masyarakat dalam segala aspek kehidupan harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk di dalamnya meliputi alat-alat perlengkapan negara, yang dalam tindakan-tindakannya, kepada warga negara atau dengan hubungannya dengan institusi negara lain, tidak boleh berlaku seenaknya atau sewenang-wenang, tetapi peraturan-peraturan hukum yang berlaku harus diperhatikan dengan baik. Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus patuh pada peraturan yang berlaku.¹

Korupsi disebut sebagai *extraordinary crime* baik di Indonesia maupun di Negara lain. Hal ini dikarenakan besarnya dampak negatif yang diakibatkan oleh korupsi baik dalam kehidupan bangsa dan negara itu sendiri maupun antar negara. Dunia internasional memiliki *United Nations Convention Against Corruption*

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum Dan Politik*, (Jakarta: Eresco, 1991), hlm. 37

(UNCAC) pada tahun 2003 sebagai suatu langkah internasional untuk mencegah dan menanggulangi korupsi karena korupsi dianggap sebagai suatu tindak pidana yang luar biasa yang mampu mempengaruhi seluruh dunia.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Preamble ke-4 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

“Convinced that corruption is no longer a local matter but transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential”.

Meyakini, bahwa korupsi bukan hanya masalah lokal saja, tetapi menjadi fenomena transnasional yang berpengaruh pada seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial.² Di Indonesia sendiri saat ini tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU Tipikor. Selain itu salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam membasmi korupsi yaitu dengan membentuk suatu lembaga negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selanjutnya disebut UU KPK.

²Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2010), hlm.3

Belakangan ini dikenal pula konsep *illicit enrichment*. Konsep *illicit enrichment* yang memiliki kesamaan dengan *unexplained wealth* dikenal dalam Pasal 20 UNCAC. Indonesia sudah meratifikasi UNCAC dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), namun Undang-Undang tersebut bersifat umum sehingga belum ada hukum yang jelas untuk mengimplementasikannya.

Aturan mengenai *Illicit Enrichment* dapat kita temukan dalam Pasal 20 UNCAC yang terjemahannya sebagai berikut:³

“Dengan memerhatikan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti, penambahan besar kekayaan (secara signifikan) pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitannya dengan penghasilannya yang sah.”⁴

Merupakan suatu tindak pidana jika dilakukan secara sengaja bila diketahui/ditemukan adanya suatu lonjakan harta yang signifikan dalam aset yang

³Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, (Bandung: Refika Aditama), 2015, hlm. 141

⁴ “Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”

dimiliki oleh pejabat publik dan ia tidak bisa menjelaskan dalam kaitannya dengan penghasilannya yang sah maka hal tersebut merupakan “*Illicit Enrichment*”. Namun di Indonesia sendiri belum mengatur mengenai *illicit enrichment* atau bisa dibilang perbuatan tersebut tidak termasuk dalam suatu tindak pidana atau delik pidana di Indonesia. Padahal dengan meratifikasi UNCAC menunjukkan bahwa Indonesia setuju atas ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya termasuk *illicit enrichment*. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengatur *illicit enrichment* sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam konsep *illicit enrichment*, apabila negara telah mempunyai bukti awal yang kuat untuk mencurigai Pejabat Publik⁵ memiliki kekayaan tidak wajar, maka negara dapat meminta orang tersebut untuk hadir di persidangan untuk membuktikan apakah harta kekayaan tersebut diperoleh dari pendapatan yang sah. Bukti awal itu sendiri bisa didapat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (selanjutnya disebut LHKPN), transaksi mencurigakan dan laporan dari masyarakat (bisa dilihat dari gaya hidup pejabat publik dan informasi lain). Sedangkan selama ini di Indonesia seseorang baru bisa dimintai membuktikan apakah harta tersebut dari pendapatan yang sah atau tidak hanya jika sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi, hal tersebut terdapat dalam Pasal 37 A dan 38B UU Tipikor.

⁵ UU RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 Angka (8) Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. Sedangkan Badan Publik berdasarkan pasal 1 Angka (3) adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Saat Indonesia menjalani penilaian dalam menerapkan UNCAC tim penilai /asesor dari United Kingdom dan Uzbekistan memberi saran pada Indonesia untuk membuat peraturan terkait dengan *illicit enrichment*. UNCAC berkeyakinan bahwa *illicit enrichment* bukan hanya berperan penting dalam mencegah dan memberantas korupsi namun juga berperan penting dalam kerjasama internasional dan untuk mengoptimalkan *asset recovery*. Indonesia sendiri sudah meratifikasi UNCAC, namun belum berlaku efektif selama Undang-Undang nasional kita belum menyesuaikan dengan ketentuan dalam UNCAC, masih diperlukan Undang-Undang pemberlakuannya baik dengan perubahan terhadap UU Tipikor, atau dengan membuat Undang-Undang baru. Jadi terjadi kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dalam peraturan terkait dengan *illicit enrichment* di Indonesia.

Selain UNCAC, kita dapat menemukan pengaturan *illicit enrichment* dalam konvensi internasional lainnya yakni dalam *Article IX International American Convention Against Corruption (IACAC)* dan dalam *Article 8 African Union Covention on Preventing and Combating Corruption (AUCPCC)*. Dari 193 negara yang ada didunia, saat ini ada 44 negara yang sudah mengatur mengenai *illicit enrichment* dalam bentuk Undang-undang.⁶ Dengan adanya beberapa rekomendasi pengaturan *illicit enrichment* di dunia membuktikan bahwa *illicit enrichment* merupakan suatu kebutuhan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁶Alvon dkk, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan kekayaan secara tidak sah) di Indonesia*, (Jakarta Selatan:Indonesia Corruption Watch, 2014), hlm. 22

Harus kita sadari makin banyaknya tindak pidana korupsi yang tidak mampu dikendalikan memberikan dampak bukan hanya terhadap kerugian negara dan perekonomian nasional tapi juga berdampak dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.⁷ Dampak yang luar biasa inilah yang menyebabkan tindak pidana korupsi dikatakan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa. Korupsi selama ini dilakukan secara meluas dan juga sistematis, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, stabilitas dan keamanan negara pun turut terganggu, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, serta kepastian hukum, Akibatnya maka kelangsungan pembangunan dan juga hak-hak sosial ekonomi berada dalam bahaya. Oleh karenanya korupsi termasuk dalam tindak pidana yang memberantasnya harus dilakukan secara luar biasa⁸, hal ini selaras dengan isi penjelasan bagian umum dari UU Tipikor⁹ dan penjelasan bagian umum dari UU KPK.¹⁰

Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN selama ini hanya dianggap sebagai formalitas belaka mengingat belum ada sanksi tegas apabila pejabat tidak melaporkan atau melakukan kecurangan dalam pelaporan hartatersebut

⁷Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 28

⁸Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 175

⁹“...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara,tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.” (Penjelasan bagian Umum UU Tipikor)

¹⁰ Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. (Penjelasan bagian Umum UU KPK)

padahal ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengawasi harta kekayaan milik pejabat publik. Berdasarkan artikel yang dimuat di website resmi KPK pada 7 November 2014 Menurut Bambang Widjojanto yang pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua KPK, bila peraturan mengenai *illicit enrichment* dibentuk maka pejabat yang harta kekayaannya meningkat secara signifikan dapat diusut sehingga dapat menguatkan fungsi dari LHKPN dalam memberantas korupsi selain itu peran masyarakat akan meningkat dalam pemantauan kekayaan pejabat. Dia memberikan contoh di negara Tiongkok, ada masyarakat yang mengunggah foto pejabat yang menggunakan jam tangan mewah kemudian dilakukan pengusutan terhadap pejabat tersebut hingga akhirnya pejabat tersebut dipecat karena tidak sesuai dengan profil kekayaannya dan terlibat korupsi.¹¹

Dalam *illicit enrichment* sendiri yang diutamakan adalah melihat adanya lonjakan signifikan dari aset yang dimiliki oleh pejabat, lonjakan signifikan tersebut yang memunculkan kecurigaan adanya kepemilikan aset dari pendapatan yang tidak sah. Kita dapat mengambil contoh bahwa beberapa koruptor yang tertangkap oleh KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) memiliki lonjakan signifikan atas aset yang dimilikinya. Misalnya dalam kasus Korupsi yang menjerat Suryadharma Ali, dalam LHKPN 4 September 2012 tertuang jumlah harta yang dimiliki sejumlah Rp 24.052.965.689,- harta ini naik sekitar 7 milyar dari laporan terdahulu tanggal 17 Desember 2009 yaitu Rp 17.021.105.198. Contoh lain adalah Hadi Poernomo yang

¹¹Humas KPK, 2014, *Dua Syarat Agar LHKPN Efektif Cegah Korupsi (online)*, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2313-dua-syarat-agar-lhkpn-efektif-cegah-korupsi>, (25 Juni 2017)

ditetapkan KPK sebagai tersangka pada tanggal 21 April 2014, LHKPN yang diserahkan pada 2010 sejumlah Rp. 38.800.979.805., pada tahun 2001 awal menjabat direktur jendral pajak total kekayaannya sejumlah 13.855.379.000 dan US\$ 50.000, pada tahun 2006 usai menjabat hartanya Rp 26.061.814.000 dan US\$ 50.000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya lonjakan signifikan dari kepemilikan aset pejabat dapat berpotensi dihasilkan dari pendapatan yang tidak sah, yang membuka kemungkinan berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 13 huruf a UU KPK, mengatur wewenang KPK dalam melaksanakan atau upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan melaksanakan pendaftaran dan memeriksa LHKPN. Hal ini merupakan pintu masuk untuk dapat mengawasi harta kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara Negara.

Di Indonesia sendiri pemberantasan korupsi dianggap masih belum bisa memenuhi harapan banyak pihak terutama masyarakat untuk memberikan hukuman yang mampu menimbulkan efek jera bagi koruptor dan memberikan efek takut dan malu bagi orang-orang yang berniat untuk melakukan korupsi. *Illicit Enrichment* dianggap mampu menimbulkan efek jera bagi koruptor itu sendiri sekaligus bisa menjadi sarana preventif atau pencegahan atas tindak pidana korupsi.

Selain itu pada kenyataan banyak beberapa pihak juga yang menganggap bahwa *illicit enrichment* melanggar HAM dan tidak sesuai dengan konstitusi di Indonesia. Penggunaan pembuktian terbalik dalam *Illicit Enrichment* dianggap menentang asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan bertentangan dengan asas lain yaitu hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang dapat

memberatkannya diperadilan nanti (*non self incrimination*). Jadi, masih terdapat pro dan kontra terhadap pengaturan *Illicit Enrichment* sebagai upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan latarbelakang masalah diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai “*Illicit Enrichment* Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penulis mengenai penelitian lain terkait dengan *Illicit Enrichment* baik pemeriksaan di Universitas Brawijaya maupun universitas lain ada beberapa peneliti terdahulu yang mengangkat tema pembinaan narapidana. Penulis melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang sejenis agar ditemukan perbedaan sehingga keorisilitasan dari tulisan ini bisa dipertanggungjawabkan. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Rumusan Masalah | Keterangan |
|----|--|---|--|---|
| 1 | A.A Mirah Endraswari, Magister Ilmu Hukum Udayana, Juli 2016 | Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Perampasan Illicit Enrichment | 1. Bagaimana pengaturan terkait pembuktian terbalik yang diatur dalam sistem hukum pidana di | Penelitian yang dilakukan oleh A.A Mirah Endraswari fokus pada pembuktian terbalik dikaitkan dengan HAM sedangkan |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|
| | | Kaitannya dengan HAM | Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perampasan terhadap <i>Illicit Enrichment</i> dikaitkan dengan HAM? | penelitian ini fokus pada <i>Illicit Enrichment</i> sebagai salah satu sarana atau upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia. |
|--|--|----------------------|--|--|

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa ide dasar dari *Illicit Enrichment* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Mengapa *Illicit Enrichment* perlu dimasukkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana formulasi pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* di Indonesia dimasa yang akan datang?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ide dasar dari *Illicit Enrichment* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan *Illicit Enrichment* perlu dimasukkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* di Indonesia dimasa yang akan datang

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini ada dua yaitu:

1. Manfaat Teoritik : Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan teoritik dibidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai *illicit enrichment* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Aplikatif :

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan referensi dalam pengembangan ilmu hukum terkait dengan *illicit enrichment* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam membentuk peraturan perundangan terkait

dengan *illicit enrichment* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.5. Kerangka Teoritik

1.5.1 Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan kriminal dalam arti luas, lazim disebut dengan kebijakan hukum pidana atau dalam bahasa inggrisnya *criminal law policy* yang terkadang juga disebut dengan pembaharuan hukum pidana atau bisa juga disebut politik hukum pidana. Akan tetapi, istilah ini lebih luas dari istilah pertama karena mencakup juga kebijakan perundang-undangan (legislasi) maupun kebijakan penegakan hukum.¹²

Istilah “kebijakan” berasal dari “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Berdasarkan istilah tersebut “kebijakan hukum pidana” juga biasa disebut “politik hukum pidana”. Menurut kepustakaan asing “politik hukum pidana” biasa disebut dengan berbagai istilah diantaranya “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.¹³

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana kita lihat dari politik hukum ataupun politik kriminal. Prof Sudarto memberikan pengertian politik hukum adalah sebagai berikut:

¹²M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 100

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 26

- a. Suatu usaha guna mewujudkan peraturan-peraturan yang baik yang mengikuti keadaan dan situasi pada suatu saatwaktu dan dimasa mendatang.¹⁴
- b. Merupakan kebijakan yang dibentuk oleh negara melalui badan yang memiliki wewenang menetapkan peraturan-peraturan yang diinginkan yang dianggap mampu digunakan untuk mengutarakan atau memperlihatkan apa yang ada dalam masyarakat dan guna meraih apa yang dicita-citakan.¹⁵

Menurut prof.Sudarto melaksanakan “politik hukum pidana” artinya melakukan pemilihan guna mendapatkan hasil peraturan pidana yang terbaik dalam arti syarat keadilan dan daya guna dapat terpenuhi.¹⁶

Politik hukum pidana adalah bagian dari politik hukum. Politik hukum pidana berarti, bagaimana mengusahakan untuk dibuatnya atau dirumuskannya suatu peraturan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel, dinyatakan sebagai ilmu dan seni yang bertujuan perumusan hukum positif menjadi lebih baik. Marc Ancel menyatakan bahwa “*Penal Policy*” adalah peraturan perundangan hukum pidana jadi *Penal Policy* dianggap atau dikatakan sama dengan kebijakan atau politik hukum pidana..¹⁷

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan guna menentukan:

¹⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm 159

¹⁵Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20

¹⁶Sudarto, op.cit, hlm. 161

¹⁷Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm 26-27

- a. Sejauh apa ketentuan atau peraturan pidana yang berlaku saat itu memerlukan perubahan atau perlu untuk diperbarui.
- b. Perbuatan apa yang dapat dilakukan guna mencegah tindak pidana.
- c. Bagaimana seharusnya cara menyelidiki, menuntut, mengadili dan melaksanakan pidana.¹⁸

Setiap usaha dan kebijakan dalam rangka membentuk peraturan yang baik sebenarnya tidak terlepas dari tujuan untuk menanggulangi kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana menjadi bagian dari politik kriminal. Daripandangan politik kriminal, politik hukum pidana lekat dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.¹⁹

Menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebenarnya merupakan bagian dari usaha menegakkan hukum. Sehingga banyak dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana termasuk sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum atau biasa disebut *law enforcement policy*.²⁰

Menanggulangi kejahatan melalui pembuatan peraturan perundangan pidana termasuk bagian dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) sehingga kebijakan atau politik hukum pidana juga menjadi bagian dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).²¹

Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana termasuk didalamnya kebijakan di bidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum

¹⁸Ibid, hlm 27

¹⁹Ibid, hlm 28

²⁰Ibid

²¹Ibid

pelaksanaan pidana.²²Jadi, dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan/politik hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana dilakukan menggunakan pendekatan kebijakan, karena pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari langkah kebijakan atau “*policy*” (bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial).Selain itu pembaharuan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan nilai yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²³

Bentuk dari pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) adalah berupa kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kriminalisasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pembentuk norma hukum pidana untuk membuat perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pidana (tindak pidana) menjadi perbuatan pidana (tindak pidana) dengan dasar-dasar rasional yang disusun sedemikian rupa untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan dekriminalisasi merupakan kebalikan dari kriminalisasi yakni yang awalnya merupakan suatu perbuatan pidana menjadi bukan perbuatan pidana. Hukum pidana beserta sanksi pidananya merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan. Upaya melalui hal demikian juga masih dipersoalkan dengan berbagai alasan. Herbert L Parker mengemukakan bahwa upaya pengendalian kejahatan yang kemudian dimaknai sebagai perbuatan anti sosial melalui penjatuhan pidana kepada orang yang melanggar peraturan pidana, merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum penting.”²⁴

²²Ibid

²³Ibid, hlm 29

²⁴Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* , (Bandung: Nusa Media, 2011),hlm. 26.

Sudarto mengatakan bahwa dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan harus memperhatikan hal-hal dibawah ini, antara lain:²⁵

- a. Tujuan pembangunan nasional harus diperhatikan dalam setiap penggunaan hukum pidana, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata materiil serta spiritual berdasarkan Pancasila; digunakannya hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan demi mencapai kesejahteraan dan pengayoman dalam masyarakat.
- b. Perbuatan yang ingin dicegah dan ditanggulangi menggunakan hukum pidana tersebut tersebut adalah perbuatan yang tidak diinginkan yakni perbuatan yang memberikan kerugian baik materiil dan/ spritual bagi masyarakat
- c. Prinsip biaya dana hasil (*cost and benefit*) harus diperhatikan dalam menggunakan hukum pidana
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- e. Kapasitas atau kemampuan dari badan penegak hukum dalam dalam menggunakan hukum pidana tidak boleh melampaui bean tugas (*oveblasting*).

Penalisasi berhubungan dengan kriminalisasi, dimana kriminalisasi menentukan suatu perbuatan dikategorikana sebagai tindak pidana maka selanjutnya yang dilakukan yaitu menentukan ancaman sanksi atas tindak pidana tersebut. Jadi penalisasi adalah proses pengancaman suatu tindak pidana menggunakan sanksi

²⁵Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 31

pidana. kriminalisasi beriringan dengan ancaman pidana atau penalisasi baik dari ancaman terendah sampai terberat.²⁶

Upaya penanggulangan pidana secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/diluar jalur hukum pidana). Upaya penal lebih menitikberatkan pada sifat yang *repressive* (penindasan, perampasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.²⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kebijakan hukum pidana dalam hal pembaharuan hukum pidana yakni dengan kriminalisasi, karena dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai *illicit enrichment* sebagai salah satu upaya baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia dimana saat ini *illicit enrichment* belum diatur di Indonesia.

1.5.2 Teori Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya hukum, beberapa ahli berusaha merumuskan teori tentang tujuan hukum, yaitu :

1) Teori Etis

Teori etis atau *Etischetheorie*, teori ini dikemukakan oleh Aristoteles mengatakan bahwa hukum hanya semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Dalam

²⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm 13

²⁷ Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm. 46

karyanya “*EthicaNicomachea*” dan “*Rhetorika*”, yang menyatakan : “Bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberikan pada orang yang memiliki hak untuk menerima”.²⁸

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu :

- a. Keadilan distributive: memberikan kepada setiap orang bagiannya menurut jasanya atau membaginya sesuai haknya. Berarti keadilan distributif ini tidak melihat keadilan dari persamaan banyaknya bagian tetapi dilihat dari kesebandingan jasa yang dilakukan.
- b. Keadilan komutatif: memberikan kepada setiap orang bagiannya yang sama banyaknya tanpa melihat jasanya. Berarti keadilan diukur dengan persamaan bagian.

Teori ini disebut dengan teori etis karena, isi hukum harus ditentukan berdasarkan kesadaran etis mengenai mana yang dianggap adil dan mana yang dirasa tidak adil. Konsep teori etis tersebut lebih memfokuskan perhatian terhadap pencapaian keadilan etis.

Keadilan etis adalah keadilan yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan tertinggi untuk menentukan standar tingkah laku manusia. Hal tersebut sesuai dengan keadilan legal atau *legal justice*. Manusia diperintahkan untuk memenuhi standar minimum dari kewajiban-kewajiban, akan tetapi sesuai dengan keadilan etis, manusia diperintahkan untuk memenuhi standar yang baik, setinggi mungkin.

²⁸Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 20

Ditinjau dari perspektif aliran-aliran dalam ilmu hukum, teori etis yang berkembang mengkaji keadilan etis yang bersumber dari etika islam dan etika asing lainnya, memiliki relevansi dengan pemikiran mazhab hukum alam sebagai mazhab hukum tertua. Menurut mazhab ini, selain hukum positif yang dibuat oleh manusia, terdapat bahwa isi hukum lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan, yang disebut “hukum alam”.²⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut teori etis, demi untuk mencapai tujuan hukum maka di dasarkan kepada keadilan filosofis dan keadilan etis.

2) Teori Manfaat (*Utilities Theory*)

Teori manfaat atau *utilities theory* merupakan teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham seorang ahli hukum dari Inggris di dalam bukunya yang berjudul, “*introduction to the morals and legislation*”. Hukum bertujuan menjamin memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk orang yang sebanyak-banyaknya. Kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang terbebas dari sengsara.³⁰

Dalam ajaran Jeremy Bentham yang dikenal sebagai bapak utilitarianisme individual mengemukakan butir- butir pokok ajarannya yaitu sebagai berikut :³¹

²⁹Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta:Pradya Paramita, 2003), hlm. 2

³⁰Riduan Syahrani, Op. Cit. hlm. 21

³¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 100

- a) Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah menciptakan “*the greatest happiness of the greatest number*” (Kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak- banyaknya orang)
- b) Menurut Jeremy Bentham tujuan dari adanya perundang-undangan demi menghasilkan kebahagiaan untuk masyarakat. Berikut ini adalah empat tujuan dari pembentukan perundang-undangan:
 - 1) *To provide subsistence* (memberikan nafkah hidup)
 - 2) *To provide abundance* (memberikan makanan yang berlimpah)
 - 3) *To provide security* (memberikan perlindungan)
 - 4) *To attain equity* (mencapai persamaan)

Maka dapat disimpulkan, menurut teori manfaat hukum ada adalah untuk memberi jaminan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya.

3) Teori Campuran atau Teori Kombinasi

Para sarjana mengemukakan bahwa, :

- a) Bellefroid dalam bukunya “*Inleding tot de rechtswetenschp in Nederland*” mengatakan bahwa isi dari hukum ditentukan berdasarkan dua asas yakni keadilan dan faedah.³²

³²C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 42

- b) Van Apeldoorn dalam bukunya "*Inleding tot de studie van het Nederlands recht*" menyatakan bahwa tujuan dari hukum yaitu mengatur kehidupan atau pergaulan dalam hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Hukum mempertahankan kedamaian manusia dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, benda dan lain sebagainya terhadap manusia yang berselisih satu sama lain. Pertikaian dan kekacauan yang dilakukan sesama manusia harus diatur dalam hukum untuk ciptakan kedamaian. dengan memberi keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi untuk mempertahankan perdamaian, di mana setiap orang harus mendapat haknya.³³
- c) Utrecht dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" menegaskan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Dalam tugas hukum tersebut secara tersirat terdapat dua tugas lainnya yaitu menjamin keadilan dan hukum harus tetap berguna. Hukum juga untuk mencegah terjadi tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*).³⁴
- d) Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum" menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat.³⁵
- e) Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisan yang berjudul "Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan" menegaskan bahwa, tujuan

³³Riduan Syahrani, Op. Cit. hlm. 18-19

³⁴Ibid, hlm. 19

³⁵Ibid

hukum adalah ketertiban. Selain itu tujuannya adalah mencapai keadilan yang berbeda isi dan ukurannya tergantung pada zaman dan masyarakatnya.³⁶

Dari pendapat para ahli yang disebutkan di atas, yang terkenal dalam teori hukum campuran ini adalah pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja. Tujuan hukum yang paling fundamental adalah tercapainya suatu ketertiban. Ketertiban merupakan syarat pokok dari terbentuknya suatu masyarakat yang teratur, meskipun ada hal lain yang menjadi tujuan hukum yaitu tercapainya keadilan. Terciptanya suatu ketertiban merupakan tujuan utama hukum, karena merupakan fakta obyektif yang berlaku untuk seluruh masyarakat dalam berbagai bentuk. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan kepastian untuk menuju keteraturan.

Teori campuran yang merupakan perpaduan dari teori etis dan teori utilitis maka tujuan hukum sebenarnya adalah satu tujuan dengan fokus berbeda-beda namun hukum membutuhkan komponen yang lain sehingga tujuan hukum secara pasti memiliki komponen keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.³⁷

Gustav mengajarkan bahwa ada tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan (*geretchtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*).³⁸ Menurut Gustav, dari tiga ide dasar tersebut yang diprioritaskan adalah keadilan, karena pada kehidupannya nyata tidaklah mudah

³⁶Ibid, hlm. 23

³⁷Ibid

³⁸ Achmad Ali, *Menyibak Tabir Hukum*, (Jakarta:Gunung Agung, 2002), hlm 3

untuk mengharmonisasikan ketiga aspek tersebut. Pendapat Gustav mengenai tujuan hukum ini sejalan dengan teori campuran yang tidak hanya fokus dalam satu tujuan saja melainkan hukum memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai.

Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia terdapat dalam alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945.³⁹ Jadi tujuan hukum positif kita menurut Pembukaan UUD NRI 1945 adalah untuk membentuk pemerintah negara Indonesia guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴⁰

Penulis sependapat dengan teori tujuan hukum pidana campuran, karena dalam teori tujuan hukum campuran isinya lebih kompleks mencakup berbagai hal mulaidari keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan lain sebagainya.

1.5.3 Teori Pidanaan

Terdapat banyak pendapat mengenai teori pidanaan, kebanyakan dari pendapat tersebut mengelompokkan teori pidanaan menjadi tiga. Tujuan

³⁹Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia , yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyata dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁴⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 2005), hlm 81

pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Berikut adalah tiga golongan besar dari teori tersebut, yaitu:

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);

Inti teori ini yaitu pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana kepada penjahat adalah hak negara karena apa yang dilakukan penjahat tersebut adalah menyerang hak dan kepentingan hukum baik pribadi, masyarakat maupun negara yang sudah dilindungi. Karena kejahatan yang dilakukan itulah maka penjahat harus diberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Penjahat dijatuhi pidana dibenarkan karena dianggap telah memberi penderitaan terhadap orang lain sehingga dia juga harus diberikaan penderitaan pula. Tujuan dari penjatuhan pidana ini adalah penderitaan yang diberikan kepada penjahat.

Pada masyarakat Jawa ada semboyan “utang pati nyaur pati” yang maksudnya orang yang membunuh harus juga dibunuh, atau adanya semboyan “*Oog om oog om tand* (mata sama mata, gigi sama gigi) dari kitab Injil oude testament. Dalam kitab suci Alquran surah An Nisaa ayat 93 yang menyatakan “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya Jahannam kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”. Ketiga kutipan tersebut diatas menunjukkan bahwa di dalamnya terkandung makna pembalasan di dalam suatu pidana.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana ditujukan pada dua hal, yaitu:

- 1) Penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
- 2) Masyarakat dalam hal ini untuk memenuhi kepuasan masyarakat untuk membalas dendam kepada penjahat (sudut objektif dari pembalasan).⁴¹

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel Theorien*);

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwa pidana adalah alat untuk tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Untuk menegakkan tata tertib itulah dibutuhkan adanya pidana.

Pidana merupakan sarana pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan, bertujuan supaya tata tertib masyarakat tetap dipelihara. Di tinjau dari suatu sudut pertahanan masyarakat itu tadi. Pidana adalah sesuatu yang “terpaksa perlu” (*noodzakelijk*) diadakan.⁴²

Menurut teori relatif, tujuan pembedaan adalah untuk:

- 1) Mencegah terjadinya kejahatan
- 2) Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan
- 3) Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana

⁴¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 157-158.

⁴²Adami Chazawi, op.cit. hlm 161-162.

- 4) Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.⁴³

c. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

Disamping pembagian secara tradisional teori-teori pembedaan seperti dikemukakan diatas, terdapat teori ketiga yang disebut Teori Gabungan (*vernegings theorien*). Penulis yang pertama kali mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁴⁴

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

⁴³Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 66.

⁴⁴Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni, 1992), hlm. 19.

⁴⁵Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 166

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Muladi, Guru Besar Hukum Pidana UNDIP di dalam Disertasinya untuk memperoleh gelar Doktor yang berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berprikemanusiaan” memperkenalkan teori tujuan pemidanaan yang *integrative* (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Menyatakan, dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat social. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih *teori integrative* tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).⁴⁶

⁴⁶Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2006), hlm 27.

Penulis setuju dengan teori pemidanaan gabungan dimana tujuan dari pemidanaan bukan hanya pembalasan tapi juga tata tertib masyarakat, bahwa disini pemidanaan berorientasi untuk memperbaiki keadaan setelah terjadinya tindak pidana tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁷ Penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum doktriner atau studi dokumen yang fokus pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain.⁴⁸ Penelitian ini termasuk penelitian normatif karena mengkaji mengenai kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dari *Illicit Enrichment* Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*).

⁴⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:Mandar Maju, 2008), hlm 86

⁴⁸Bambang Waluyu, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang:Ghalia Indonesia, 1996), hlm 13

Pendekatan konsep digunakan untuk menganalisis konsep dasar *dari illicit enrichment*.

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Penelitian normatif diharuskan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena objek dari penelitian adalah aturan hukum itu sendiri.⁴⁹ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah berbagai perturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi.

c. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)

Dalam penelitian ini pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan beberapa negara dan beberapa konvensi yang telah mengatur mengenai *illicit enrichment* dalam hukum positifnya.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Soerjono Soekanto membagi sumber bahan hukum di dalam penelitian hukum menjadi tiga, yaitu:⁵⁰

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa berbagai peraturan yang terkait dengan *illicit enrichment*.

Dalam penelitian ini yaitu melalui:

⁴⁹Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 302

⁵⁰Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3851
- 4) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150
- 5) Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4250
- 6) Undang-Undang RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4846

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, buku-buku maupun literatur, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah serta bahan seminar lokakarya, dan sebagainya.⁵¹ Seluruh data yang dapat mendukung ataupun membantu menjelaskan hukum primer dalam hal ini yang terkait dengan *illicit enrichment*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁵²

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi hukum maupun melalui internet. Teknik tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan *illicit enrichment* kemudian mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tersebut untuk nantinya diolah sedemikian rupa oleh peneliti.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum merupakan proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai

⁵¹Ibid

⁵²Bambang sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 114.

dengan karakter preskriptif ilmu hukum.⁵³ Bahan hukum yang telah diperoleh berupa studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan artikel yang digunakan diuraikan sedemikian rupa, dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat untuk dapat merumuskan teorinya dan dipaparkan secara komprehensif.⁵⁴ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif, yaitu dengan pengkajian dan pendalaman serta pencarian atas jawaban tentang apa yang seharusnya berdasarkan setiap permasalahan.

Penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis adalah penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan lain.⁵⁵ Interpretasi gramatikal adalah sebuah pola penafsiran kata-kata yang ada dalam undang-undang dengan kaidah tata bahasa.⁵⁶

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka berisikan kajian pustaka mengenai tindak pidana korupsi dan *Illicit Enrichment*.

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan ke 11*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35

⁵⁴Bahder Johan Nasution, op.cit, hlm. 88

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, op.cit, hlm. 172

⁵⁶Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta:Raja GrafindoPersada, 2013), hlm. 169

BAB III Hasil dan Pembahasan berisikan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, terkait dengan *illicit enrichment*

BAB IV Kesimpulan dan Saran merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terkait *illicit enrichment* sebagai suatu upaya baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Kajian Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1.1.1. Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas lebih dalam mengenai tindak pidana korupsi, berikut akan dibahas sedikit mengenai apa itu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dikenal dalam dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis, melihat bahwa semua syarat dalam penjatuhan pidana sebagai unsur tindak pidana aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatan (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggungjawaban dalam hukum pidana). aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana).¹

Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis antara lain: Simon, Hamel, Mezger, Karni, Wiryoyo Prodjodikoro. Salah satu sarjana yang termasuk kelompok monistis yaitu Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

¹ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang:UM Press, 2001), Hlm 22-23

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah: Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, misalnya unsur “dimuka umum” dalam Pasal 218 KUHP. Yang termasuk unsur subjektif adalah: orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.²

Menurut Moeljanto yang menganut aliran dualistis, menyebutkan bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar”. Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan

² Ibid, hlm 22

unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.³ Ada atau tidak adanya kesalahan ada pada orang yang melakukan perbuatan tergantung pada penilaian mengenai dirinya, yaitu mengenai keadaan batinnya. Unsur kesengajaan tidak merupakan unsur perbuatan tetapi merupakan unsur pertanggung jawaban pidana. unsur kemampuan bertanggungjawab dan sengaja bukanlah unsur tindak pidana tetapi unsur pertanggungjawaban pidana (yang oleh pandangan monistik disebut unsur subjektif).⁴

Setelah membahas mengenai tindak pidana, selanjutnya penulis akan membahas mengenai tindak pidana korupsi. Pengertian dari tindak pidana korupsi dalam bahasa latin disebut *corruptio* dan *corruptus*. Menurut *Webster Student Dictionary*, korupsi digambarkan dengan menggunakan istilah "*corruptus*". Andi Hamzah menyatakan "*corruptio*" atau "*corruptus*" berasal dari bahasa latin kemudian muncul dalam bahasa Eropa "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" lalu dalam bahasa Indonesia disebut korupsi, yang berarti suka disuap.⁵

Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian tipikor merupakan sebuah perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau bisa juga disebut penggelapan atau penyelewengan

³ Ainul Samsyu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hlm 15-16

⁴ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 233

⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1995), hlm. 135

uang negara demi kepentingan diri sendiri atau orang lain.⁶ Korupsi (*corruptive*) adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang dengan cara menyogok, menyuap, menerima sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan merugikan keuangan negara. Korupsi juga adalah perbuatan bejat yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara melawan hukum.⁷ Korupsi adalah gambaran hubungan antara negara dan sektor swasta. Kadang - kadang petugas negara yang menjadi pelaku dominan kadang-kadang pelaku swasta yang paling berkuasa. Kekuasaan tawar-menawar relatif berdampak terhadap masyarakat dan menentukan bagian keuntungan yang didapat antara penyogok dan yang disogok.⁸ Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Tipikor dimasukkan ke dalam hukum pidana khusus didasarkan pada empat alasan. Pertama, terkait dengan pengaturan tindak pidana. Undang-undang tindak pidana korupsi mengatur beberapa delik baru yang tidak ditemukan dalam KUHP seperti korupsi terkait kerugian keuangan negara dan gratifikasi.⁹

Kedua, terkait dengan pertanggungjawaban pidana. UU Tipikor tidak hanya mengkategorikan manusia sebagai subjek delik tapi juga korporasi. Sedangkan dalam KUHP korporasi tidak diakui sebagai subjek delik, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. ketentuan demikian disimpangi oleh undang-undang

⁶ Aziz Syamsuddin, op.cit, hlm. 15.

⁷ La Sina, *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, Volume 26 No 1, Jurnal Hukum Pro Justitia, Universitas Katolik Parahyangan, 2008, hlm 49-50

⁸ Susan Rose-Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat, dan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 157

⁹ Mahrus Ali, op.cit, hlm. 14

korupsi. pasal 1 ayat (3) undang-undang korupsi secara eksplisit menyatakan bahwa makna “setiap orang” tidak hanya orang perorangan, tapi termasuk juga korporasi. Sedangkan mengenai penutupan maupun menjatuhkan pidana dapat dikenakan kepada korporasi dan atau pengurusnya. Apabila tuntutan pidana diberikan kepada suatu korporasi, maka diwakili oleh pengurus dari korporasi tersebut.¹⁰

Ketiga, terkait dengan sanksi pidana. UU Tipikor mengatur perumusan ancaman pidana secara kumulatif, dan kumulatif-alternatif-, serta ancaman pidana minimum khusus. ketentuan mengenai perumusan ancaman pidana demikian tidak dikenal dalam KUHP, sebab KUHP sendiri hanya mengenai dua sistem perumusan ancaman pidana, yaitu sistem perumusan tunggal dan sistem perumusan alternatif. Selain itu dalam UU Tipikor pidana bagi pelaku delik percobaan dan delik pembantuan disamakan dengan pidana bagi delik yang selesai.¹¹

Keempat, terkait dengan hukum acara pidana. UU Tipikor mengatur ketentuan beracara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan dalam KUHP, seperti diakuinya sistem pembalikan beban pembuktian, perampasan aset, pembayaran uang pengganti, dan peradilan *in absentia*.¹²

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK adalah suatu lembaga negara independen dan bebas dari

¹⁰ Ibid, hlm. 14-15

¹¹ Ibid, hlm 15

¹² Ibid, hlm. 15-16

pengaruh kekuasaan manapun dalam setiap tugas dan wewenang yang ia miliki. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan visi mewujudkan lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Misi dari KPK adalah pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi serta menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.¹³

Sebagaimana diketahui, KPK selanjutnya diberikan bentuk-bentuk kewenangan yang bersifat khusus dan luar biasa. Secara konkrit diatur bahwa metode pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan, pertama “penerapan sistem (pembebanan) pembuktian terbalik”; sekalipun sistem ini masih terbatas pada dua tindak pidana baru yakni tuntutan/gugatan perampasan terhadap harta benda terdakwa korupsi yang diduga berasal atau didapatkan dari hasil tindak pidana dari pasal-pasal tertentu dalam undang-undang korupsi dan juga terhadap gratifikasi.¹⁴

1.1.2. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan KUHAP, beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 137 KUHAP menyebutkan, bahwa “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang

¹³Herry Susilowati, *Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Vol 2, Research Report - Humanities and Social Science, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2012, hlm 25

¹⁴Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta:Pustaka Kemang, 2016), hlm. 163-164

mengadilinya”. Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana (umum) diletakkan pada beban Jaksa Penuntut Umum.¹⁵

Dalam perkembangannya beban pembuktian yang semula berada ditangan jaksa Penuntut Umum kemudian bergeser menjadi beban terdakwa. Dalam hal ini terdakwa berperan akti menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa didepan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. konsep inilah yang kemudian disebut dengan pembalikan beban pembuktian (*the reversal burden of proof*).¹⁶ Pembalikan beban pembuktian hanya digunakan dalam kasus-kasus tertentu saja misalnya dalam tindak pidana korupsi, penggunaan pembuktian terbalik ini seminimal mungkin tidak melakukan destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan HAM bagi tersangka maupun terdakwa itu sendiri.¹⁷ Pada dasarnya UU Tipikor dalam Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B menganut sistem pembalikan beban pembuktian.

Adanya sistem pembuktian terbalik memberikan konsekuensi bahwa terdakwa disini juga diberikan hak membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya, maka akan ada

¹⁵ Mahrus Ali, op.cit, hlm. 67

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, **Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian**, (Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji, S.H. dan Rekan, 2006), hlm 132

¹⁷ Ibid, hlm 133

keseimbangan antara asas praduga tak bersalah dan asas *nonself incrimination* dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada semua orang.¹⁸

1.2 Kajian Umum *Illicit Enrichment*

1.2.1. Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

Terbentuknya UNCAC dilatarbelakangi oleh keprihatinan sosial dari negara-negara di dunia (menjadi negara-negara pihak dalam konvensi) atas keseriusan dan ancaman yang disebabkan tindak pidana korupsi terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat yang menyebabkan rusaknya lembaga-lembaga, merusak nilai-nilai demokrasi, merusak nilai-nilai etika, dan keadilan serta dapat menyebabkan kekacauan pada pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Selain itu, negara-negara pihak dalam konvensi meyakini bahwa tindak pidana korupsi bukan lagi masalah social suatu negara, melainkan sudah menjadi fenomena internasional yang memengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi.¹⁹

Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006. Pertimbangan UNCAC diratifikasi Indonesia ialah berdasarkan tiga alasan berikut (i) karena melibatkan aset yang besar, yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan, (ii) karena korupsi bukan lagi masalah lokal akan

¹⁸ Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 73

¹⁹ Kristian dan Yopi Gunawan, op.cit, hlm. 130.

tetapi merupakan fenomena transnasional, (iii) karena penting adanya kerjasama internasional untuk pemulihan dan pengembalian aset-aset atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi.²⁰

Tujuan UNCAC dimuat dalam Bab 1 Pasal 1 Pernyataan Tujuan adalah: pertama, meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan pencegahan maupun pemberantasan korupsi secara lebih efisien dan efektif; kedua, meningkatkan, memudahkan dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengembalian aset; dan meningkatkan integritas, akuntabilitas dan pengelolaan masalah serta kekayaan publik dengan baik dan benar.²¹ Arti penting lainnya dari ratifikasi konvensi tersebut yaitu sebagai berikut:²²

- a. Untuk meningkatkan kerjasama internasional terutama guna pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ada diluar negeri.
- b. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik
- c. Meningkatkan kerjasama internasional dalam melaksanakan perjanjian ekstradisi, menyerahkan narapidana, bantuan hukum timbal balik, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum

²⁰Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta:Pustaka Kemang, 2016), hlm. 184

²¹Jamin Ginting, *Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia*, Vol 11 No 3, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Soedirman, Purwokerto, 2011, hlm. 453

²²Kristian dan Yopi Gunawan, op.cit, hlm 78

- d. Mendorong terjalinnya kerjasama mengenai teknik dan bertukar info dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
- e. Mengharmonisasi peraturan perundang-undangan nasional guna mencegah dan memberantas korupsi sesuai dengan UNCAC.

Illicit berasal dari kata *licit* yang artinya berdasar hukum atau tidak terlarang. Menurut *Webster's American English Thesaurus* (2002), kata *licit* digunakan untuk hal-hal terbatas sesuai dengan ketentuan hukum atau suatu aturan semisal pemakaian obat-obatan tertentu di rumah sakit. Adanya awalan *il-* diidepan kata *licit* menjadikan kebalikan dari kata *licit* sehingga artinya menjadi tidak berdasar hukum atau terlarang.²³ Sedangkan arti kata *enrichment* dalam bahasa Indonesia adalah memperkaya/mempersubur, penyuburan.²⁴ Jadi *illicit enrichment* bisa dikatakan adalah pengayaan terlarang, peningkatan kekayaan secara tidak sah atau kekayaan yang tidak wajar.

Illicit enrichment seringkali dipersamakan dengan *Unjust Enrichment*, *unjust enrichment*²⁵ adalah (ajaran untuk memperkaya diri sendiri dengan cara tidak sah) merupakan suatu prinsip hukum bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain atau

²³ Kasijanto Sastrodinomo, *Kekayaan Haram*, KOMPAS, 12 Apr 2014

²⁴ <http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/enrichment> (Online, tanggal 23 Mei 2017)

²⁵ <https://www.kamusbesar.com/unjust-enrichment%2C-doctrine-of> (Online, tanggal 23 Mei 2017)

mengorbankan orang lain, orang yang melakukan hal tersebut harus memberikan restitusi atas keuntungan yang diperolehnya tersebut.

Selain itu *illicit enrichment* juga sering dipersamakan dengan *unexplained wealth* padahal keduanya berbeda, untuk lebih memudahkan membedakan antara keduanya berikut ini tabel perbedaan antara *illicit enrichment* dengan *unexplained wealth*:²⁶

Tabel 2.1
Perbedaan *Illicit Enrichment* dengan *Unexplained Wealth*

| | Subjek | Objek | Mekanisme | Bentuk sanksi |
|---------------------------|----------------|---|--|--|
| <i>Illicit enrichment</i> | Pejabat publik | Perbuatan pidana untuk memperkaya diri (<i>in personam</i>) | Negara hanya dapat melalui mekanisme hukum acara pidana (<i>conviction based asset forfeiture</i>) | Hukum pidana dan tambahan selain dirampas hartanya |
| <i>Unexplained wealth</i> | Setiap orang | Dugaan kekayaan harta yang diperoleh | Negara hanya dapat merampas | Tergantung keputusan pengadilan |

²⁶ Alvon dkk, Op.cit, hlm. 57

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | dari tindak pidana atau masalah atau kekayaan (in rem) | harta tersebut melalui hukum acara perdata (non conviction based asset forfeiture) | terkait dengan perampasan atas harta tersebut. |
|--|--|--|--|--|

Illicit Enrichment diatur secara eksplisit dalam Pasal 20 UNCAC yang berbunyi:

Article 20:

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”

“Dengan memerhatikan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam

arti, penambahan besar kekayaan (secara signifikan) pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitannya dengan penghasilannya yang sah.”²⁷

Gandjar Laksmana Bonaprpta, praktisi hukum dan akademisi menyebutkan unsur penting *Illicit Enrichment* adalah:²⁸

- a) Memperkaya diri atau memiliki kekayaan yang memiliki peningkatan secara signifikan
- b) Ia tidak dapat menjelaskan secara wajar (peningkatan kekayaan itu)
- c) Peningkatan kekayaan itu terjadi akibat perbuatannya
- d) Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja

Dalam pandangan lain, Menurut Chandra Hamzah, pengaturan *Illicit Enrichment* lebih menekankan atau fokus pada aset.²⁹

Pengertian *Illicit Enrichment* dalam UNCAC tidak hanya tertuju kepada pejabat publik secara konvensional tapi juga dalam arti luas termasuk setiap pegawai publik secara luas harus dapat dijelaskan asal muasal dari aset yang dimiliki apabila terjadi peningkatan aset yang signifikan dari seluruh pendapatan atau penghasilan yang dimiliki yang telah melaporkan asetnya. Jadi subjeknya adalah setiap pejabat publik termasuk pegawai publik.³⁰

²⁷Ibid, hlm. 141

²⁸Alvon dkk, op.cit, hlm 29

²⁹Ibid

³⁰Ibid, hlm 24

Illicit enrichment dalam konvensi hanya mendapatkan mandat untuk menjabarkan standar minimum saja. Dimana negara peserta bebas untuk mengaturnya lebih lanjut. UNCAC telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), sehingga masih diperlukan Undang-undang untuk memberlakukannya baik dengan cara merubah UU Tipikor, maupun dengan membuat suatu peraturan perundangan yang baru.³¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tersebut hanya bersifat pengesahan UNCAC bukan merupakan pemberlakuan guna memberlakukan ketentuan suatu tindak pidana. Sedangkan dalam UNCAC sendiri *Illicit Enrichment* merupakan delik pidana. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP³² yaitu asas legalitas harus ada peraturan perundangan yang mengatur delik pidana tersebut karena itulah diperlukan suatu undang-undang pemberlakuan untuk memenuhi asas legalitas yang berlaku di Indonesia.³³

Perampasan aset sendiri ada dua mekanisme yaitu perampasan aset dengan mekanisme hukum pidana (*Criminal forfeiture* atau *in personam forfeiture*) dan

³¹Romli Atmasamita, *Pemikiran Romli Atmasamita tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 191

³²suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada

³³Ibid

perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (*civil forfeiture, non-conviction based forfeiture* atau *in rem forfeiture*), berikut penjelasannya:³⁴

- a. Perampasan aset dengan mekanisme pidana (*Criminal forfeiture* atau *in personam forfeiture*), adalah suatu *judgement in personam againts the defendant* yaitu perampasan yang dilakukan berkaitan dengan pidanaan seorang terpidana. Perampasan aset ini merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara persona, karena itu dibutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa. Jaksa penuntut umum harus lebih dahulu membuktikan tindak pidana yang dilakukan dan hubungan tindak pidana tersebut dengan aset yang dimiliki terdakwa, jika terbukti maka putusan pengadilan menjadi dasar hukum merampas aset tersebut.
- b. Perampasan aset dengan mekanisme perdata (*civil forfeiture, non-conviction based forfeiture* atau *in rem forfeiture*) yaitu suatu perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus tindak pidana, pemerintah mengajukan gugatan *in rem* terhadap aset yang diduga hasil perolehan tindak pidana, dimana gugatan *in rem* diajukan tanpa perlu adanya kasus tindak pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputus oleh pengadilan. *In rem forfeiture* adalah tindakan melawan aset dan bukan terhadap individu (orang/persona), karena tindakan tersebut melawan aset maka pemilik aset diposisikan sebagai pihak ketiga yang punya hak untuk

³⁴Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta, 2012, hlm 24

mempertahankan aset. Perampasan aset in rem berprinsip bahwa pemegang hak tidak mempunyai hak untuk menguasai/memiliki aset yang diperoleh dari perbuatan melanggar hukum.

1.2.2. Pengaturan *Illicit Enrichment* di Beberapa Negara

Dari 193 negara didunia, saat ini ada 44 negara didunia yang sudah mengatur tentang *Illicit Enrichment*. Diantaranya, 39 negara memberikan ancaman berupa sanksi kurungan atau penjara, contohnya mesir, cina dan beberapa negara lain. Sedangkan masa hukumannya antara 14 hari hingga 12 tahun dipenjara. Namun ada juga beberapa negara yang mengaitkan besarnya pidana dengan besarnya kekayaan tidak wajar yang dimiliki. Sekitar 26 negara juga memberikan sanksi denda yang beraneka ragam, ada yang menggunakan perhitungan 50-100% namun ada juga yang menghitungnya dengan mengkalikan dua kali nilai *illicit enrichment*. Selain sanksi penjara dan denda sanksi administratif dengan cara dipecat, dilarang untuk menjabat suatu jabatan tertentu dan pencabutan hak pemilu, misalnya di negara chile, uganda dan beberapa negara lain.³⁵

Ada 44 negara yang telah mengatur *illicit enrichment* dalam Undang-undang, berikut adalah 4 contoh negara yang telah mengatur *illicit enrichment* dalam undang-undang:³⁶

³⁵Ibid, hlm. 22

³⁶Ibid, hlm. 25-26

Tabel 2.2
Beberapa Peraturan Perundangan yang Mengatur *Illicit Enrichment*

| Negara | Peraturan Perundang-Undangan |
|-------------|---|
| India | Undang-undang(<i>article 13 Prevention of Corruption Act of 1988</i>) |
| Guyana | Undang-Undang(<i>Integrity Commission Act 1998</i>) |
| Sierra Leon | Undang-undang(<i>Anti-Corruption Act 2008, Part IV</i>) |
| Cina | Undang-Undang(<i>Criminal Law 1997, Article 395</i>) |

Berikut dibawah ini adalah unsur *Illicit Enrichment* dari keempat negara diatas :³⁷

- a. India tertuju pada setiap pejabat publik (yang menjabat atau atas jabatannya) selama dalam masa jabatannya tidak dapat dijelaskan rekening yang dia miliki berasal dari perolehan atau pendapatan yang sah, sumber yang berkaitan dengan uang pajak kekayaan yang tidak sepadan dari pendapatan (diluar pajak).
- b. Guyana tertuju pada setiap orang pelaku pelayanan publik atau atas nama jabatan publik memiliki kekayaan atau yang dapat dihitung dengan uang yang tidak wajar dari pendapatannya dan gagal membuktikan kepemilikan

³⁷Ibid, Hlm 28

- harta dan sumber dapat dihitung dalam bentuk uang melalui mekanisme hukum (pengadilan, dan pajak)
- c. Sierra Leon ditujukan kepada setiap orang yang menjadi pegawai publik mempunyai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained wealth*) yang tidak dapat dijelaskan melalui pengadilan
 - d. Cina ditujukan pada setiap penyelenggara negara memiliki kekayaan dan pengeluaran melebihi pendapatannya yang tidak dapat menjelaskan sumber pendapatannya dari yang sah maka dinyatakan sebagai perolehan yang illegal.

Objek pengaturannya adalah aset-aset yang dimiliki oleh para pejabat publik dan orang. Hukum yang dikenakan denda dan pidana penjara. Masa pidananya beragam paling rendah 6 bulan yaitu Guyana dan paling tinggi 5 tahun yaitu Cina. Sedangkan Sierra Leon mengatur *unexplained wealth* dianggap sama dengan *illicit enrichment* dengan lama pidana antara 6 bulan - 5 tahun.³⁸

Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam konvensi lainnya selain dalam UNCAC yakni dalam *International American Convention Against Corruption (IACAC)* dan dalam *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (AUCPCC)*. Berikut adalah tabel perbedaan dari ketiga konvensi tersebut:³⁹

³⁸Ibid, 29

³⁹ Ibid, 23

Tabel 2.3
Perbandingan Tiga Konvensi yang Mengatur *Illicit Enrichment*

| Konvensi | Pengaturan | Makna |
|----------|---|---|
| UNCAC | <i>a significant increase in the assets of public official he she/he can reasonably explain in relation to his or her lawful income</i> | Peningkatan aset dari pegawai publik yang tidak mampu menjelaskan pendapat baik dari gaji maupun diluar gaji (setelah pelaporan kekayaan) |
| IACAC | <i>A significant increase in the assets of government official that he can not reasonably explain in relation to his lawful earning during the performance on his functions</i> | Peningkatan aset dari pegawai pemerintahan yang tidak mampu menjelaskan penghasilan berupa gaji (sebelum pelaporan kekayaan) |
| AUCPCC | <i>The significant increase in the assets of public official or any other person which he or she</i> | Peningkatan aset pegawai publik atau setiap orang lainnya yang tidak dapat menjelaskan pendapatnya |

| | | |
|--|---|--|
| | <i>cannot reasonably to his or her income</i> | berupa gaji dan bukan gaji (sebelum pelaporan) |
|--|---|--|

Dari tabel diatas kita dapat menemukan beberapa perbedaan terutama subjek dan objeknya. Dalam UNCAC subjeknya adalah pegawai publik secara umum sedangkan objeknya adalah *lawful income* , pendapatan baik dari gaji maupun diluar gaji (setelah pelaporan kekayaan). IACAC subjeknya adalah pegawai pemerintah, lebih sempit pengertiannya dibanding UNCAC sedangkan objeknya adalah *lawfull earning* , berupa gaji (sebelum pelaporan kekayaan). AUCPCC subjeknya adalah pejabat publik atau setiap orang lainnya bisa dibilang subjek ini yang paling luas karena mencakup bukan hanya pejabat publik tapi juga orang lain dalam arti luas, sedangkan objeknya adalah *income*, pendapatannya berupa gaji maupun bukan gaji (sebelum pelaporan).

Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam konvensi internasional lainnya yakni dalam *Article IX International American Convention Against Corruption (IACAC)* dan dalam *Article 8 African Union on the Prevention and Combating Corruption (AUPCC)*. Dari UNCAC, IACAC dan terdapat perbedaan mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam UNCAC adala *public official* (pejabat publik), dalam IACAC adalah *government official* (pejabat pemerintah), sedangkan dalam AUCPCC mencatut semua orang bukan hanya pejabat publik “....*any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income*”.

Berdasarkan Undang-Undang RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 Angka (8)⁴⁰ sedangkan Badan Publik diatur berdasarkan pasal 1 Angka (3)⁴¹. Berdasarkan pasal tersebut pejabat publik adalah pejabat yang menjajab dalam badan publik yang dalam hal ini termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif serta badan lain atau organisasi nonpemerintah lain yang dananya berasal dari APBD.

Apabila ditelisik lebih jauh apa yang dimaksud dengan pejabat pemerintah secara harfiah sama dengan penyelenggara negara. Sedangkan apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara salah satunya tertuang dalam Pasal 1 ayat (1)⁴² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Selanjutnya disebut UU Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN)⁴³. Bahwa penyelenggara negara menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Pengertian jabatan dan pejabat yang dikemukakan oleh Bagir Manan tergambar dalam Undang-Undang

⁴⁰ Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

⁴¹ Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

⁴² Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴³ Milda Istiqomah, *Kebijakan Formulasi Pegaturan "Illicit Enrichment" Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Volume 23 No 1, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, Hlm 82

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua jenis, yakni pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam Pasal 15 UU ASN disebutkan bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Artinya, pasal tersebut menyatakan bahwa pegawai ASN pada tingkat pelaksana pun dikategorikan sebagai pejabat, yakni pejabat pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai ASN, baik yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK merupakan pejabat pemerintahan atau pejabat publik.

Dengan begitu pejabat publik termasuk didalamnya yang menjalankan perusahaan publik seperti BUMN yang memperoleh dana dari APBN sehingga juga dapat dikenakan *Illicit Enrichment*. Bahwa pejabat publik yang dimaksud disini sama dengan pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁴⁴

⁴⁴ Ibid

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Ide Dasar *Illicit enrichment*

Landasan yuridis dari *illicit enrichment* terdapat dalam pasal 20 UNCAC yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2007 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), namun Undang-Undang tersebut masih umum dan jelas untuk mengimplementasikannya. Hal ini berarti adanya kekosongan hukum terhadap *illicit enrichment*, kepastian hukum juga dijamin dalam pasal 1 ayat (1) KUHP¹ atau biasa disebut dengan asas legalitas dimana suatu perbuatan dapat dipidana hanya bila telah ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Oleh karena itu perlu untuk dibentuk suatu peraturan perundang-undangan terkait *illicit enrichment* baik dengan membuat peraturan perundang-undangan yang baru atau dengan memperbarui undang-undang yang telah ada.

Kemudian terkait dengan LHKPN sebagai bukti awal dari *illicit enrichment* dasar hukumnya dapat kita temukan dalam pasal 5 UU Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN² dan Pasal 13 huruf (a) KPK.³ Kedua Pasal ini

¹Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

²Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memegang jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;

dapat menjadi landasan yuridis LHKPN sebagai bukti awal dimana pejabat publik haruslah melaporkan harta kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat dan KPK berwenang untuk memeriksa LHKPN tersebut.

Landasan filosofis dari *illicit enrichment*, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia setiap peraturan perundangan yang ada haruslah selaras dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum selain itu tidak lupa nilai-nilai yang hidup dimasyarakat haruslah diperhatikan. Tujuan nasional negara Indonesia dapat kita lihat didalam UUD NRI 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut perlu dirumuskan suatu kebijakan-kebijakan nasional/social (Social Policy). Keseimbangan tujuan dan keseimbangan landasan inilah yang menjadi titik tolak pembahasan Kebijakan Hukum Pidana.

Di dalam Pancasila terdapat lima nilai yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan dan terakhir nilai keadilan.

-
5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
 6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan

- a) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b) menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c) menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d) merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e) melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f) melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Adanya tindak pidana korupsi kita ketahui bertentangan dengan kelima nilai yang ada dipancasila tersebut. Nilai ketuhanan, bahwasanya pelaku tindak pidana korupsi telah menyalahi norma agama karena menghalalkan sesuatu yang haram dengan merugikan orang banyak dan menyalahgunakan kekuasaan ada padanya. Nilai kemanusiaan, dimana kita sesama manusia seharusnya saling memanusiakan dengan tidak merampas hak satu sama lain, adanya korupsi merampas hak sosial dan ekonomi orang lain. Nilai persatuan, dimana pelaku tindak pidana korupsi tidak memperdulikan adanya persatuan dengan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri guna mendapatkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Nilai Kemasyarakatan, dimana pejabat publik yang seharusnya membangun negara sebagai wakil rakyat yang telah diberi amanah malah melakukan korupsi yang mengakibatkan perumbuhan negara terhambat. Nilai keadilan, rasa keadilan bagi rakyat tidak dapat terpenuhi selama pelaku tindak pidana korupsi dengan mudahnya merampas hak sosial dan ekonomi rakyat yang seharusnya hidup adil dan sejahtera. Jadi sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi menyalahi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang merupakan sumber dari sumber hukum di Indonesia.

Landasan sosiologis dari *illicit enrichment*, bahwasanya tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian negara, menyebabkan kemiskinan dan membuat kepercayaan rakyat terhadap negara terutama pejabat publik menjadi rendah. Sehingga tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa ini membutuhkan suatu upaya yang luar biasa pula dalam pemberantasannya, *illicit enrichment* menjadi upaya baru karena tidak hanya berfokus kepada pelaku tetapi kepada aset guna mengembalikan kerugian negara.

Saat Indonesia menjalani penilaian dalam menerapkan UNCAC tim penilai /assesor dari United Kingdom dan Uzbekistan memberi saran pada Indonesia untuk membuat peraturan terkait dengan *illicit enrichment*. UNCAC berkeyakinan bahwa *illicit enrichment* bukan hanya berperan penting dalam mencegah dan memberantas korupsi namun juga berperan penting dalam kerjasama internasional dan untuk mengoptimalkan *asset recovery*. Jadi intinya, lahirnya *illicit enrichment* adalah suatu upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terlebih dalam rangka pengembalian aset negara agar lebih optimal.

Illicit enrichment diatur secara eksplisit dalam Pasal 20 UNCAC yang berbunyi:

Article 20:

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”

“Dengan memerhatikan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti, penambahan besar kekayaan (secara signifikan) pejabat publik yang

tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitannya dengan penghasilannya yang sah.”⁴

Dari pasal tersebut kita dapat menarik beberapa unsur didalamnya yaitu:

- a. Dilakukan dengan sengaja
- b. Perbuatan memperkaya diri atau memiliki peningkatan kekayaan yang signifikan
- c. Dilakukan oleh pejabat publik
- d. Tidak dapat dijelaskan secara wajar perihal kekayaan tersebut dikaitkan dengan penghasilannya yang sah

Unsur yang pertama yaitu dilakukan dengan sengaja, bahwa perbuatan disengaja tersebut diketahui oleh pihak yang melakukan (pelaku) perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut harus dikehendaki oleh pelaku perbuatan tersebut dalam hal ini yang melakukan *illicit enrichment*. Kesengajaan merupakan tanda yang paling penting untuk menentukan adanya kesalahan pelaku. Kesengajaan ditujukan pada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Adanya tindakan dan akibat yang terjadi mengharuskan seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkannya. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi suatu pidana apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Namun, walaupun ia melakukan suatu perbuatan pidana tidaklah selalu dia dapat dipidana.

⁴Kristian dan Yopi Gunawan, Op.cit, hlm. 141

Unsur yang kedua yaitu perbuatan memperkaya diri atau memiliki peningkatan kekayaan yang signifikan, yang dilihat dari *illicit enrichment* adalah adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan antara penghasilan sah dari pejabat publik baik dari gaji bulanan maupun pendapatan lain, maka patut dicurigai bahwa harta tersebut didapat dari pendapatan yang tidak wajar atau tidak sah atau dari tindak pidana korupsi. *Illicit enrichment* merupakan suatu tindak pidana yaitu bagian dari tindak pidana korupsi.

Permasalahan muncul terkait dengan kata-kata “*significant*”, sebab untuk dapat mengetahui seberapa signifikan kekayaan pejabat publik tersebut sulit untuk ditentukan ukurannya. ICW berpendapat bahwa frasa “*significant*” menjadi sangat penting guna menekankan ukuran batas (limitasi) peningkatan pendapatan yang mesti dijelaskan secara detail apa maksud dan ukurannya agar tidak menimbulkan perdebatan dan menciptakan kepastian hukum. Sebab frasa ini cukup berpotensi menjadi perdebatan terutama tentang ukuran peningkatan pendapatan yang “*significant*”. Menurut Milda Istiqomah dosen fakultas hukum Universitas Brawijaya dalam karya tulisnya, memberikan arti bahwa kata “*significant*” tersebut artinya terjadi peningkatan terhadap harta kekayaan pejabat publik yang dimaksud. Tidak wajar disini dapat dikatakan melebihi apa yang seharusnya didapat atau diperoleh dari pejabat publik tersebut. Oleh karena itu, ukuran signifikan tidak dapat ditentukan, namun dapat dipahami dengan arti melebihi dari jumlah pendapatan yang sah/legal atau tidak seimbang dengan pendapatannya yang sah/legal.⁵ Jadi, makna signifikan itu tidaklah perlu ditentukan ukurannya namun bisa dilihat melalui kelebihan perolehan harta

⁵ Milda Istiqomah, op.cit, Hlm 84

kekayaan yang dimiliki pejabat publik bila dibandingkan dengan pendapatan sah yang dimiliki.

Unsur yang ketiga yaitu dilakukan oleh Pejabat Publik, berdasarkan Undang-Undang RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 Angka (8)⁶. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pejabat publik yang dimaksud disini sama dengan pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian pustakabahasanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pejabat publik disini termasuk didalamnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu pejabat yang menjalankan perusahaan publik seperti BUMN yang memperoleh dana dari APBN dapat dikenakan *illicit enrichment*.

Pengaturan *illicit enrichment* dalam konvensi lainnya yakni dalam *Article IX International American Convention Against Corruption (IACAC)* dan dalam *Article 8 African Union on the Prevention and Combating Corruption (AUPCC)*. Dari UNCAC, IACAC dan terdapat perbedaan mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam UNCAC adalah *public official* (pejabat publik), dalam IACAC adalah *government official* (pejabat pemerintah), sedangkan dalam AUCPCC mencatut semua orang bukan hanya pejabat publik “....*any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income*”.

Unsur yang keempat tidak dapat dijelaskan secara wajar perihal kekayaan tersebut dikaitkan dengan penghasilannya yang sah. Kekayaan disini dari hasil

⁶ Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik

pendapatan pejabat publik, baik gaji maupun bukan gaji. Bukti awal dari *illicit enrichment* bisa didapat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), transaksi mencurigakan dan laporan dari masyarakat (bisa dilihat dari gaya hidup pejabat publik dan informasi lain). Dalam hal ini pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat sebagai pejabat publik untuk dapat diperiksa harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat tersebut sah dan bukan merupakan dari tindak pidana korupsi atas jabatan yang dimilikinya.

Menurut Bambang Widjojanto yang pada saat artikel ini dimuat (di upload di website resmi KPK pada 7 November 2014)⁷ menjabat sebagai Wakil Ketua KPK ada kecenderungan penyerahan LHKPN dilakukan pejabat hanya sebagai formalitas saja. Bambang mengatakan bahwa sebenarnya ada dua hal yang dapat meningkatkan efektivitas fungsi pelaporan LHKPN dalam pemberantasan korupsi. Pertama, perlu disertai mekanisme pemeriksaan jika ada yang mencurigakan. Kedua, pihak yang dengan sengaja menyembunyikan asal usul dan tak memberi informasi utuh tentang kekayaannya dapat diberikan sanksi tegas. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan tentang *illicit enrichment* atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar, jadi pejabat yang harta kekayaannya meningkat secara signifikan dengan tidak wajar dapat diusut. Ini yang kemudian dapat menguatkan peran LHKPN dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu dalam memberantas korupsi peran masyarakat juga amatlah penting, yakni dengan melakukan kontrol sosial terhadap pejabat publik. Peran

⁷ Humas KPK, 2014, *Dua Syarat Agar LHKPN Efektif Cegah Korupsi (online)*, <https://www.kpk.go.id/berita/berita-kpk-kegiatan/2313-dua-syarat-agar-lhkpn-efektif-cegah-korupsi>, (25 Juni 2017)

serta masyarakat hendaknya tidak hanya dipahami dari satu sisi yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang hendak menggunakan haknya dalam memperoleh dan menyampaikan informasi tentang pejabat publik. Tetapi, harus juga dipandang sebagai upaya untuk menertibkan penggunaan hak tersebut. Dengan perkataan lain kebebasan menggunakan hak tersebut harus disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran masyarakat paling tidak mengandung tiga esensi yaitu perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggungjawab bagi masyarakat dalam menggunakan haknya, dan penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta.⁸

Jadi, peran masyarakat disini juga bisa menjadi bagian dalam mendapatkan bukti awal dari *illicit enrichment* mengingat bahwa masyarakat adalah bagian terdekat dalam suatu lingkungan sehingga mudah bagi masyarakat untuk melihat bagaimana gaya hidup dari pejabat sebagai salah satu sarana kontrol sosial dan bila dilihat adanya kecurigaan adanya kekayaan yang tidak wajar maka masyarakat bisa melaporkannya. Bentuk peran serta masyarakat terdapat dalam UU Tipikor dalam pasal 41 ayat (2).⁹ Namun sayangnya partisipasi masyarakat

⁸ ICW, *Usulan Draft Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Versi Masyarakat "RUU Tindak Pidana Korupsi"*, (Jakarta:ICW, 2015), Hlm 153

⁹ Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

dalam pasal tersebut masih belum operasional, oleh karena itu bila nantinya *illicit enrichment* diatur di Indonesia maka peran dari masyarakat ini juga perlu disesuaikan pengaturannya.

Membahas mengenai *illicit enrichment* tidak bisa terlepas dari pro kontra dari penggunaan pembuktian terbalik yang dianggap menentang asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan bertentangan dengan asas lain yaitu hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkannya diperaadilan nanti (*non self incrimination*).

Tindak pidana korupsi dimasa sekarang tidak dapat dipungkiri semakin berkembang dan sulit pembuktiannya, Adanya pembalikan beban pembuktian menjadi salah satu upaya untuk memudahkan pembuktian. Namun, penguannya harus tetap dibatasi dalam hal atau pengaturan tertentu saja pembuktian terbalik dapat digunakan. Pembuktian terbalik yang menganut asas praduga bersalah (*presumption of guilty*) berbeda dengan beban pembuktian yang diberikan pada penuntut umum yang menganut asas praduga tak bersalah. Dalam asas praduga bersalah ini jaksa tidak diberikan beban pembuktian dakwaan, dengan adanya dakwaan tersebut terdakwa dianggap bersalah kemudian terdakwalah yang diberi kewajiban untuk membuktikan bila dia tidak bersalah.

Adanya sistem pembuktian terbalik memberikan konsekuensi bahwa terdakwa disini juga diberikan hak membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya, maka

e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

- 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c;
- 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor , saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

akan ada keseimbangan antara asas praduga tak bersalah dan asas hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkannya diperadilan nanti dengan perlindungan hukum yang harus diberikan kepada tiap orang.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pemenuhan hak asasi manusia juga terdapat batasan, yang terdapat dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945.¹¹ Sehingga yang ditekankan dalam beban pembuktian terbalik dalam upaya pemberantasan korupsi bukan pada pelanggaran terhadap hak-hak individual atau pelanggaran terhadap privasi semata, Namun sebagai solusi dalam pemberantasan korupsi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jadi pada dasarnya pembuktian terbalik ini sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Hak diam dipandang sebagai bagian dari hak praduga tak bersalah. Pembuktian terbalik mengharuskan seseorang harus mencari bukti untuk menolak kecurigaan jaksa atas kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Ini berarti bahwa jika seseorang memilih untuk tetap diam, dia dapat bertanggung jawab atas hukuman. *Illicit enrichment* membatasi hak ini, tetap diam dan tidak menyangkal kecurigaan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah menyebabkan seseorang dianggap bersalah.

¹⁰ Igm Nurdjana, op.cit, hlm. 73

¹¹ Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembuktian terbalik menjadi suatu cara untuk mempercepat proses pembuktian dalam kasus korupsi yang besar. Dalam *illicit enrichment*, sebuah pilihan harus dilakukan untuk menghormati kepentingan kolektif masyarakat dalam memerangi korupsi atau menegakkan hak asasi manusia karena proses hukum, hal ini semata-mata dilakukan guna memenuhi kebutuhan kebijakan publik dan untuk mencapai keseimbangan antara masyarakat dan kepentingan individu.

Dalam kasus Jaksa Agung Hong Kong v Lee Kwong-kut menyatakan bahwa setiap pembatasan atas praduga tidak bersalah dapat dibenarkan asalkan ada hubungan rasional antara fakta yang disangka dan fakta yang telah terbukti, dan selanjutnya bahwa praduga tersebut (di dalam Kasus dugaan bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara tidak sah) adalah respons yang proporsional terhadap masalah sosial yang ditangani. Bahwa praduga tidak bersalah dapat dibatasi asalkan pembatasan tersebut bersifat rasional dan proporsional.

Dalam kasus tersebut, Pengadilan Tinggi Hongkok berpendapat bahwa Jaksa penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu dengan cara "*beyond reasonable doubt*" tentang status tersangka, standar hidup dan total penghasilannya yang sah serta membuktikan bahwa kekayaan yang dimiliki tersebut seharusnya tidak terjangkau dengan penghasilannya yang sah. Setelah penuntut umum membuktikannya barulah terdakwa dapat dipanggil untuk membuktikan asal usul dari harta kekayaannya tersebut. Baru kemudian Pengadilan Tinggi Hong Kong harus memutuskan apakah hal-hal tersebut dapat diperhitungkan sebagai standart hidup yang berlebihan atau sebagai sumber keuangan yang tidak sepadan dengan harta bendanya.

Proses tersebut dianggap tidak bertentangan dengan HAM karena terdakwa sendiri diberikan hak untuk menjelaskan asal usul dari harta kekayaan yang dimiliki dan penuntut umum pun diberi kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang berhubungan dengan bukti awal tindak pidana tersebut, sistem pembuktian seperti ini, disebut sistem "*balance probabilities*".¹²

Korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang luar biasa oleh karena itu penanganannya pun tidak bisa dilakukan secara biasa, diperlukan pembaharuan didalam hukum pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat bahwa korupsi memberikan dampak yang besar dalam menghambat perkembangan negara dan ragam dari korupsi pun semakin berkembang dari masa ke masa. *Illicit enrichment* merupakan salah satu cara pemberantasan korupsi yang sudah digunakan diberbagai negara, hal ini bisa menjadi contoh untuk mengimplementasikannya di Indonesia.

1.2. Perlunya Pengaturan *Illicit Enrichment* dimasukkan Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebelum membahas lebih dalam mengenai perlunya pengaturan *illicit enrichment* sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi penulis akan memberikan penjelasan dan analisis terhadap beberapa peraturan di Indonesia yang berhubungan dengan *illicit enrichment*.

¹² Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003*, Jurnal Ilmiah Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2007, Hlm 9 (di download melalui badilum.mahkamahagung.go.id)

Dalam *illicit enrichment*, apabila negara telah mempunyai bukti awal yang kuat untuk mencurigai seseorang (Pejabat Publik) memiliki kekayaan tidak wajar, maka negara dapat meminta orang tersebut untuk hadir di persidangan untuk membuktikan apakah harta kekayaan tersebut diperoleh dari pendapatan yang sah. Bukti awal itu sendiri seperti yang dijelaskan disub bab sebelumnya bisa didapat dari LHKPN¹³, transaksi mencurigakan dan laporan dari masyarakat (bisa dilihat dari gaya hidup pejabat publik dan informasi lain). Selama ini di Indonesia seseorang baru bisa diminta membuktikan apakah harta tersebut dari pendapatan yang sah atau tidak hanya jika sudah ditetapkan sebagai terdakwa kasus tindak pidana korupsi, hal tersebut terdapat dalam Pasal 37 A¹⁴ dan 38B¹⁵ UU Tipikor.

¹³ Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mewajibkan bagi setiap penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat, dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur kewenangan KPK dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

¹⁴ Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan
- (2) **Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.**
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

¹⁵ Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) **Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi dan hakim**

Bila kita telaah ada sedikit kemiripan dengan *illicit enrichment* yaitu dalam hal harus membuktikan tentang kekayaan yang dimiliki apakah berasal dari tindak pidana atau tidak. Namun berbeda dengan *illicit enrichment* dimana *illicit enrichment* merupakan delik pidana jadi bila dalam pasal tersebut seseorang baru bisa diminta pertanggungjawaban bila sudah berstatus terdakwa maka *illicit enrichment* dari awal proses penyelidikan dan seterusnya. Selain itu pasal tersebut hanya untuk menguatkan bukti adanya tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jadi bisa dikatakan meskipun ada sedikit kemiripan namun pasal tersebut jelas berbeda dengan *illicit enrichment* sebagaimana yang ada di UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pembuktian terbalik yang ada dalam UU Tipikor tersebut bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana atautkah dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal. Atau sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam

berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda seseorang tersebut dirampas untuk negara.

- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

hal terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal.¹⁶ Pasal 37A ayat (3) tetap mewajibkan penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembalikan beban pembuktian tersebut bersifat tidak murni.

Kelemahan lain dalam UU Tipikor adalah bahwa harta yang dapat disita hanyalah harta yang berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi yang sedang diusut atau yang pada saat itu masih diproses saja padahal tidak menutup kemungkinan bahwa harta kekayaan tidak wajar yang dimiliki berasal dari tindak pidana diluar yang diproses. Selain itu jumlah harta yang disita tidak bisa maksimal, hukuman tambahan hanya sebatas yang digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi sehingga tidak menutup kerugian yang dialami negara. Bila pelaku tidak mampu membayar uang pengganti maka diganti dengan kurungan penjara. Selain itu dalam pemberantasan korupsi terutama dalam perampasan aset dimana seharusnya pemeriksaan dilakukan dari awal penyelidikan dan penyidikan agar tidak terjadi penyembunyian atau penjualan aset sebelum vonis dijatuhkan. karena ada kemungkinan aset tersebut dialihkan, disembunyikan atau dijual sebelum adanya vonis.

Perampasan aset seharusnya dijadikan fokus dalam tindak pidana yang berunsur ekonomi seperti tindak pidana korupsi agar pelaku tidak dapat menguasai dan menikmati hasil tersebut dan untuk sarana preventif agar tidak ada yang mencoba untuk melakukannya juga. Adanya mekanisme subsider (penggantian) atas kewajiban pembayaran aset hasil tindak pidana membuat upaya perampasan

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Malang; Bayumedia Publishing, 2011), Hlm 76

aset tidak maksimal karena kebanyakan terpidana akan memilih untuk menyatakan ketidakmampuannya sehingga hanya akan diganti dengan kurungan.

Dalam RUU Tipikor dan RUU Perampasan Aset juga terdapat norma yang mirip dengan konsep *illicit enrichment* berikut perbandingannya:¹⁷

Tabel 3.1
Perbandingan RUU Perampasan Aset dan RUU Tipikor

| RUU Tipikor | RUU Perampasan Aset |
|--|--|
| Pasal 77 | Pasal 3 |
| (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Bab II wajib membuktikan bahwa kekayaan yang diperoleh bukan berasal dari tindak pidana korupsi. | (1) Setiap orang yang memiliki aset yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas berdasarkan Undang-undang ini. |
| (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian kekayaan tersebut | (2) Aset yang tidak seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset tidak |

¹⁷ Alvon dkk, op.cit, hlm 61-62

| | |
|---|--|
| <p>dirampas untuk negara.</p> <p>(3) Tuntutan perampasan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok. (Kumulatif)</p> <p>(4) Pembuktian bahwa kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.</p> <p>(5) Dalam hal terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok maka tuntutan perampasan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.</p> | <p>wajar yang dihitung melalui total kekayaan dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah.</p> |
|---|--|

Bila kita telaah 2 pasal tersebut terdapat beberapa perbandingan pertama pada subjeknya baik dalam RUU Tipikor dan RUU Perampasan Aset subjeknya adalah siapa saja. Padahal akan lebih mudah penelusurannya bila subjeknya difokuskan pada pejabat publik seperti yang terdapat dalam UNCAC 2003.

Kedua, objeknya berbeda dalam RUU Perampasan aset objeknya adalah harta kekayaan yang tidak seimbang dengan pendapatan sedangkan dalam RUU Tipikor objeknya adalah kekayaan yang berasal dari korupsi. dalam pengaturan objek pun RUU Perampasan Aset lebih luas karena mencakup semua aset yang tidak seimbang dengan pendapatan/penghasilan sedangkan dalam RUU Tipikor hanya mencakup aset hasil dari korupsi tersebut saja (kasus korupsi yang sedang diperiksa saat itu).

Ketiga, sanksinya dalam RUU Perampasan Aset adalah perampasan aset sedangkan dalam RUU Tipikor adalh penjara dan perampasan aset. Untuk sanksi RUU Tipikor lebih baik karena terdapat sanksi bagi pelakunya dan asetnya (pelaku dipenjara dan aset dapat dilakukan perampasan) sedangkan RUU Perampasan aset hanya sanksi berupa perampasan aset saja.

Bila kita lihat RUU Perampasan aset lebih condong pada *unexplained wealth* dibandingkan *illicit enrichment*. Seperti yang telah dijelaskan disubbab sebelumnya bahwa *Illicit enrichment* objeknya adalah perbuatan pidana memperkaya diri (*in personam*) sedangkan *unexplained wealth* objeknya adalah dugaan kekayaan harta didapatkan berasal dari suatu tindak pidana, masalah kepemilikan atau kekayaan (*in rem*). Berbeda dengan *unexplained wealth* yang fokus pada perampasan aset tanpa pemedanaan, maka *illicit enrichment* selain adanya perampasan aset pelaku tindak pidananya juga dapat dikenakan pidana. berikut ini akan dijelaskan sedikit mengenai perampasan aset in personam dan in rem.

Perampasan *In personam* ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual). Tindakan tersebut merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Selain itu, permohonan perampasan aset harus diajukan bersamaan dengan berkas penuntutan oleh penuntut umum.¹⁸

Sedangkan perampasan *In rem* adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus tindak pidana, pemerintah mengajukan gugatan *in rem* terhadap aset yang diduga hasil perolehan tindak pidana, dimana gugatan *in rem* diajukan tanpa perlu adanya kasus tindak pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputus oleh pengadilan.¹⁹ Antara dua jenis perampasan seperti yang telah disebutkan di atas terdapat tujuan yang sama, yaitu perampasan terhadap hasil dan sarana dalam tindak pidana oleh negara.

Namun sayangnya dalam RUU Tipikor ini juga belum mencakup konsep dari *illicit enrichment* itu sendiri karena dalam RUU tipikor tidak mengatur mengenai *illicit enrichment* sebagai delik tapi hanya digunakan untuk memperkuat bukti adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sama halnya seperti dalam Pasal 37 A 38 B.

¹⁸ Marfuatul Latifah, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesi*, volume 6 No 1, Negara Hukum, P3DI Bidang Hukum, 2015, Hlm 21-22

¹⁹ Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta, 2012, hlm 24

RUU Tipikor fokus pada pemidanaan dan perampasan aset sedangkan RUU Perampasan Aset fokus pada perampasan asetnya terutama dalam aspek keperdataannya. Bisa dikatakan bahwa dua RUU ini bisa saling melengkapi satu sama lain. Namun keduanya masih sama-sama belum dapat mencakup ide dasar dari *illicit enrichment* yang ada dalam UNCAC.

Di Indonesia saat ini telah mengatur tindak pidana pencucian uang yang menggunakan pembuktian terbalik sama halnya dengan *illicit enrichment*. Perbedaan mendasar antara *illicit enrichment* dengan tindak pidana pencucian uang adalah adanya tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang sedangkan dalam *illicit enrichment* tidak ada. Tindak pidana asal diketahui dari bukti awal, hubungan kausalitas antara perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa. Berdasar pasal 78, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, kewajiban terdakwalah untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal. Berbeda dengan *illicit enrichment* yang tidak ada pidana asalnya, dalam *illicit enrichment* terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang dia miliki berasal dari pendapatan yang sah.

Pembaharuan hukum pidana dilakukan menggunakan pendekatan kebijakan, karena pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari langkah

kebijakan atau “*policy*”. Selain itu pembaharuan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan nilai yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁰

Pendekatan kebijakan merupakan pendekatan yang rasional. Didalam setiap langkah kebijakan harus terdapat pendekatan yang rasional didalamnya. Hal tersebut adalah konsekuensi logis, sebagaimana yang dikatakan oleh Sudarto, dalam melaksanakan kebijakan orang menilai dan memilih dari berbagai macam alternatif yang dihadapi. Suapun politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yang dibentuk harus dibentuk secara sadar dan sengaja. Bahwa dipilih dan ditetapkannya hukum pidana menjadi suatu sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan berbagai faktor guna mendukung berjalannya fungsi dan kerja dari hukum pidana didunia nyata. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan yang fungsional dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.²¹

Adanya pengaturan *illicit enrichment* dalam pandangan rasional menjadi penting guna mengembalikan kerugian negara, guna pencapaian kesejahteraan masyarakat, sekaligus perlindungan masyarakat mengingat bahwa dengan adanya korupsi berdampak pada terhambatnya pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dan melanggar hak sosial serta hak ekonomi negara. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwasanya UU Tipikor, RUU Perampasan Aset, dan RUU Tipikor yang baru masih belum memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam *Illicit Enrichment* oleh karena itu adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) mengharuskan dibentuknya suatu peraturan terkait *illicit enrichment* baik dengan

²⁰Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm 29

²¹ Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm 31

membentuk Undang-Undang tersendiri atau dengan memperbarui UU Tipikor yang ada.

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dengan masalah nilai. Sebagaimana disebutkan dalam sub bab sebelumnya bahwasanyatindak pidana korupsi melanggar nilai-nilai yang ada dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jadi diperlukan suatu upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi salah satu upaya baru yang dianggap mampu berkontribusi banyak dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan *illicit enrichment*.

Menurut Dr. Muhammad Yusuf dalam national workshop, Kajian Penerapan UNCAC di Indonesia Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* Dalam Delik Korupsi di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2014, beliau pada saat itu menjabat Kepala PPATK menyatakan ada beberapa keunggulan pengaturan *illicit enrichment*, yaitu:²²

- a. Dapat memperkuat UU Tipikor dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Karena UU Tipikor dan UU TPPU memiliki batasan dalam menjerat aset hasil tindak pidana korupsi.
- b. Menguatkan fungsi LHKPN agar tidak hanyamenjadi formalitas dan tidak memiliki sanksi bagi pejabat memalsukan/berbohong terkait harta kekayaan yang dimiliki.

²² Muhammad Yusuf, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Delik Korupsi*, Disampaikan dalam national workshop, Jakarta, 18 Februari 2014

- c. Pemiskinan koruptor menggunakan pembalikan beban pembuktian yakni terdakwa yang harus membuktikan asal usul dari harta kekayaan yang dimiliki, dapat dimaksimalkan.
- d. Pembuktian menjadi lebih mudah dibandingkan dengan UU TPPU, pasal gratifikasi dan UU Tipikor.
- e. Fokus terhadap niatan/motivasi melakukan korupsi (mengumpulkan kekayaan)
- f. Aset seseorang yang didaftarkan atas nama pihak ketiga (misalnya anggota keluarga) akan tetap dianggap sebagai aset dari pejabat publik selama dapat dibuktikan terkait peralihan harta tersebut kepada pihak ketiga.
- g. Harta kekayaan yang dirampas dapat dialokasikan untuk negara guna pencapaian keadilan, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan maupun pelayanan bagi rakyat lainnya.

Berdasarkan banyak keunggulan seperti disebutkan diatas maka dapat menjadi pertimbangan betapa pentingnya pengaturan *illicit enrichment* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas atau seringkali juga disebut tujuan hukum. Pertama, keadilan hukum yang meninjau dari sudut filosofis. Kedua, kepastian hukum yang meninjau dari sudut yuridis. Ketiga, kemanfaatan hukum yang meninjau dari sudut sosiologis. Adanya *illicit enrichment* diharapkan dapat memberikan keadilan atau menyelaraskan hak dan kewajiban pejabat publik, negara dan juga warga negara dimana pejabat publik berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya melayani negara dan warga

negara bukannya melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan warga negara. Mengingat bahwa hingga saat ini *illicit enrichment* masih belum diatur di Indonesia maka belum ada kepastian hukum atas pejabat publik yang melakukan *illicit enrichment*, padahal UNCAC sendiri menjamin bahwa *illicit enrichment* merupakan suatu upaya yang baik guna pencegahan maupun dalam pemberantasan tindak pidana korupsi jadi sudah seharusnya bagi pemerintah segera mempertimbangkan untuk membuat peraturan terkait *illicit enrichment*. Dalam sudut kemanfaatan, *illicit enrichment* menjadi upaya baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena tidak hanya fokus kepada pelaku tapi terhadap asetnya dalam hal ini terkait dengan pengembalian kerugian atau aset negara yang dikorupsi.

Perampasan aset atau pengembalian aset negara menjadi salah satu kekurangan dalam memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia, diharapkan dengan adanya peraturan perundangan terkait dengan *illicit enrichment* maka perampasan aset guna mengembalikan kerugian negara dapat dilakukan secara optimal. Selain itu dalam UNCAC juga mengatur terkait kerjasama internasional pengembalian aset atau *asset recovery* dengan berbagai negara, oleh karena itu hal ini bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia mengingat bahwa banyak hasil korupsi yang disimpan diluar negeri. *Illicit enrichment* mempermudah pengoptimalan dari pengembalian aset tidak pidana korupsi terlebih karena dalam *illicit enrichment* tidak perlu adanya unsur kerugian negara. Berikut ini adalah

beberapa alasan mengapa upaya pengembalian aset harus terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia:²³

1. Berdasarkan data kerugian keuangan negara Indonesia disebut sebagai negara korban korupsi
2. Bahwa dana atau aset yang dikorupsi merupakan harta kekayaan negara yang pada dasarnya digunakan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan tindak pidana korupsi telah mengambil hak tersebut dari rakyat.
3. Negara berkewajiban melindungi dan menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya dari alternatif sumber pendanaan yang dimiliki dan sumber tersebut salah satunya adalah dari aset hasil korupsi
4. Pengembalian aset merupakan cara pencegahan (preventif) dan pemberantasan (represif). Pencegahan disini untuk menunjukkan pada pelaku tindak pidana korupsi bahwa tidak ada tempat aman untuk menyembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi dan pemberantasan terlihat dari pemidanaan terhadap pelaku.
5. Indonesia telah meratifikasi UNCAC sehingga tersedia landasan hukum internasional untuk melaksanakan kerja sama internasional dalam rangka pengembalian aset hasil dari tindak pidana korupsi.

Landasan yuridis dari pengembalian aset, bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik secara eksplisit maupun implisit mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi khususnya pengembalian aset yang

²³ Purwaning M. yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung:Alumni, 2007), Hlm 17-18

dicuri/dikorupsi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pemerintah, yudikatif dan parlemen merupakan kepanjangan mandat rakyat, artinya pemerintah dan parlemen wajib menjalankan mandat yang telah diberikan kepada oleh rakyat. Pemberantasan dan pencegahan korupsi termasuk pengembalian aset-aset negara yang dikorupsi /dicuri merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah.²⁴

Berikut ini adalah landasan filosofis dari pengembalian aset. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan terlaksana apabila aset-aset negara yang dikorupsi dikembalikan untuk pemenuhan kepentingan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Utilitarianisme sosial menekankan kepada kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan individu, dan menekankan kewajiban dibandingkan dengan hak. Teori manfaat atau *utilities theory* merupakan teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham seorang ahli hukum dari Inggris di dalam bukunya yang berjudul, "*Introduction to the morals and legislation*" yang menyatakan bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya "*the greatest happiness for the greatest number*". Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.²⁵ Pengembalian aset merupakan tindakan yang mengarahkan orang kepada jumlah kebahagiaan sedangkan tindakan korupsi mencurangi kebahagiaan masyarakat karena merugikan orang banyak. untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka pengembalian

²⁴ ICW, op.cit, Hlm 133

²⁵ Riduan Syahrani, Op. Cit. hlm. 21

aset harus dilakukan guna memenuhi kepentingan masyarakat banyak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya *illicit enrichment* menjadi salah satu cara untuk melakukan pengembalian aset secara optimal.

Menurut John Rawls ada dua prinsip keadilan yang pertama diharapkan adanya kesetaraan dalam mencapai kebebasan, sementara untuk prinsip yang kedua berhubungan dengan distribusi ekonomi. Untuk pemenuhan keadilan maka dua prinsip tersebut harus dipenuhi. Karena pada dasarnya setiap orang tidak hanya membutuhkan kebebasan, tetapi juga membutuhkan kesejahteraan. Demikian juga sebaliknya. Praktek-praktek korupsi menghambat kebebasan individu dan juga kesejahteraan. Korupsi menciptakan instabilitas politik yang mengganggu kebebasan individu, sementara korupsi juga menghambat pemenuhan kesejahteraan. Pengembalian aset-aset hasil korupsi sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan umum dan negara, dan menciptakan stabilitas politik yang kondusif untuk menjamin kebebasan individu, dan juga pemenuhan kesejahteraan individu. Pengembalian aset hasil korupsi sejalan dengan pemenuhan kedua prinsip keadilan menurut John Rawls yakni kebebasan dan keadilan.²⁶

Dalam landasan sosiologis, pengembalian aset hasil korupsi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas pemerintah khususnya aparat penegak hukum. Selain itu banyak sekali kasus dimana pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak wajar yang seringkali terlihat dalam gaya hidup mereka dan menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahkan seperti yang dicontohkan dilatarbelakang ada beberapa pejabat publik yang melakukan korupsi

²⁶ ICW, op.cit, Hlm 140

dan saat diperiksa kekayaannya memiliki lonjakan yang signifikan dalam beberapa tahun yang bila dilihat tidak wajar bila jabatannya menghasilkan kekayaan sedemikian banyaknya. Kemudian ada kebutuhan riil untuk membentuk lembaga pengelola aset-aset hasil korupsi yang independen dan profesional. Diharapkan dengan adanya *illicit enrichment* maka pengembalian aset negara dapat lebih optimal sehingga pertumbuhan dan perkembangan negara serta kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan baik.

Perubahan hukum haruslah mengarah kepada pembaharuan hukum. Gagasan pembaharuan hukum, terutama dalam hukum pidana, menurut Romli Atmasasmita, merupakan keharusan yang tidak dapat dielakkan dan ditunda lagi. Salah satu alasan utama pembaharuan hukum dibidang hukum pidana , menurut muladi, yaitu alasan adaptif . Bahwa hukum pidana nasional dimasa-masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan international yang telah disepakati.²⁷ Begitu juga dengan hadirnya *illicit enrichment* yang menjadi upaya baru bagi pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya fokus kepada orang atau pelaku sebagai target tapi juga mengembalikan aset dengan strategi *follow the money* guna mengembalikan aset negara.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa perlunya *illicit enrichment* dimasukkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu tujuan utamanya adalah dalam rangka mengembalikan aset negara atau kerugian negara, mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap masyarakat yang terpenting

²⁷ Purwaning M. yanuar, op.cit, Hlm 205

pula guna mendirikan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945 serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang selama ini nilai-nilai tersebut telah dilanggar dengan adanya tindak pidana korupsi.

1.3. Formulasi Pengaturan *Illicit enrichment* di Indonesia dimasa yang akan Datang

Sebagai negara hukum maka setiap tindak pidana harus diatur terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum. Aspek asas legalitas memiliki makna bahwa ketentuan dapat dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kekuatan peraturan perundang-undangan dalam arti formal, yang berarti peraturan perundang-undangan dalam arti materiil yang dibuat oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwasanya Indonesia sudah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006, namun masih diperlukan suatu peraturan perundangan untuk mengimplementasikannya dan belum adanya pengaturannya menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of norm*). Meskipun Pasal 37 A dan 38 B UU Tipikor, RUU Perampasan Aset dan RUU Tipikor terdapat konsep yang hampir sama dengan *illicit enrichment* namun sayangnya ketiganya masih belum bisa mengakomodir *illicit enrichment* sebagaimana yang diatur dalam UNCAC. Dari segi subjek, objek, mekanisme dan sanksi masih diperlukan harmonisasi agar sesuai dengan konsep *illicit enrichment* sebagaimana yang ada dalam UNCAC.

Asas legalitas memiliki dimensi politik hukum, dimensi politik kriminal dan dimensi organisasi. Dari perspektif dimensi politik hukum, asas ini menegaskan bahwa hanya undang-undangleh yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, saksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana dapat dijatuhkan, dan bagaimana peradilan pidana itu seharusnya dijalankan. Ini mengandung arti perlindungan terhadap anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah. Dari perspektif dimensi kebijakan kriminal , menjamin adanya rumusan-rumusan undang-undang yang jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan tentang tindak pidana-tindak pidana dan pidana-pidananya, sehingga dapat melakukan fungsi kebijakan pidana yang baik. Penerapan yang tegas dari asas legalitas memungkinkan warga masyarakat untuk menilai semua akibat kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya perbuatan pidana. Sedang dari perspektif dimensi organisasi, lebih menunjuk pada segi pragmatis asas legalitas yang menekankan pentingnya kejelasan perorganisasian perundang-undangan pidana dengan rumusan dan batasan yang jelas dari masing-masing wewenang dalam sistem hukum pidana.²⁸ Maka berdasarkan asas legalitas ini perlu dibentuk suatu peraturan perundangan terkait *illicit enrichment* untuk menyatakan bahwa *illicit enrichment* merupakan suatu delik pidana yang atasnya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Bentuk dari pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) adalah berupa kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kriminalisasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pembentuk norma hukum pidana untuk membuat perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pidana (tindak pidana) menjadi perbuatan

²⁸ Purwaning M. yanuar, op.cit, Hlm 84

pidana (tindak pidana) dengan dasar-dasar rasional yang disusun sedemikian rupa untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan dekriminalisasi merupakan kebalikan dari kriminalisasi yakni yang awalnya merupakan suatu perbuatan pidana menjadi bukan perbuatan pidana.²⁹ Dalam penulisan ini yang digunakan adalah kriminalisasi atas *illicit enrichment*, dimana hingga saat ini belum diatur mengenai *illicit enrichment* oleh karena itu dibutuhkan pembaharuan hukum berupa kriminalisasi.

Hukum pidana telah biasa dipakai sebagai instrumen dan upaya penanggulangan kejahatan. Bahkan, penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan suatu cara yang paling tua sehingga disebut sebagai “the older philosophy of crime control”. Pada kontes ini, hukum pidana adalah suatu kebijakan yang ditujukan untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi suatu kejahatan.³⁰

Pandangan Imanuel Kant juga dipakai H.L.A. Hart, pemidanaan harus mengandung rasa sakit atau mempunyai dampak yang tidak menyenangkan yang secara sengaja ditujukan kepada para pelanggar aturan hukum. Pemidanaan harus menimbulkan rasa sakit atau kerugian yang sengaja dimaksudkan untuk diderita pelaku. Filsafat hukum pembalasan inilah yang menjadi dasar utama atau pijakan dasar dari teori hukum retributive. Prinsipnya adalah, siapa melakukan kesalahan maka dia harus menerima hukuman, siapa telah mencuri uang maka ia pantas dihukum, siapa yang melakukan tindak korupsi maka pengembalian uang hasil

²⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 26.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 155-156

tindak korupsinya tidak serta merta dapat menghapuskan hukuman atas tindak pidananya.³¹

Seiring berjalannya waktu pemidanaan menjadi bersifat plural dan seimbang antara retributif, restoratif dan utilitarian. Pemidanaan ditujukan untuk menghukum pelaku tindak pidana secara proporsional sesuai dengan kadar kesalahannya. Pemidanaan tersebut juga tidak hanya bersifat restoratif karena dapat memperaiki suatu kerugian yang telah timbul akibat suatu tindak pidana tetapi pemidanaan juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi korban kejahatan dan masyarakat serta lingkungan yang dirugikan atas terjadinya kejahatan tersebut.³² Berpijak pada perspektif inilah, pemberantasan korupsi tidak hanya menekankan aspek represif semata tetapi secara sengaja membangun sistem pencegahan dan penanggulangan atas kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, yang dalam *illicit enrichment* terkait dengan pengembalian aset.

Menurut Lynda Muzila ada 4 tujuan pemidanaan *illicit enrichment* yaitu:³³

1. Memulihkan kerugian negara yang terjadi karena korupsi;
2. Menghukum pejabat yang melakukan;
3. Mencegah pejabat tersebut menikmati hasil kejahatannya;
4. Membuat yang bersangkutan tidak dapat melakukan lagi pelanggaran dengan cara memberhentikan atau memenjarakannya.

Dari 193 negara didunia, saat ini ada 44 negara didunia yang sudah mengatur tentang *Illicit enrichment*. Sejumlah 39 negara diantaranya memberikan

³¹ ICW, op.cit, Hlm 51

³² Ibid

³³ Alvon dkk, Op.cit, hlm. 57

ancaman berupa sanksi kurungan atau penjara, contohnya mesir, cina dan beberapa negara lain. Sedangkan masa hukumannya antara 14 hari hingga 12 tahun dipenjara. Namun ada juga beberapa negara yang mengaitkan besarnya pidana dengan besarnya kekayaan tidak wajar yang dimiliki. Sejumlah 26 negara juga memberikan sanksi denda yang beraneka ragam, ada yang menggunakan perhitungan 50-100% namun ada juga yang menghitungnya dengan mengkalikan dua kali nilai *illicit enrichment*. Selain sanksi penjara dan denda sanksi administratif dengan cara dipecat, dilarang untuk menjabat suatu jabatan tertentu dan pencabutan hak pemilu, misalnya dinegara chili, uganda dan beberapa negara lain.³⁴

Dalam kajian pustaka pada BAB II penulis memberikan 4 perbandingan negara yang telah mengatur mengenai *Illicit enrichment*. Pada dasarnya *illicit enrichment* dari keempat negara (India, Guyana, Sierra Leon dan China) tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu kekayaan yang tidak sah atau tidak wajar. Subjeknya meliputi pembantu publik, seseorang yang menjalani tugas publik atau aktivitas pelaksanaan aktivitas publik dan penyelenggara negara. Objeknya untuk India adalah kepemilikan harta, hak milik dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan pendapatannya. Guyana berupa kepemilikan harta atau sumber lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang melebihi dari harta kekayaan sah. Sierra Leon berupa kekayaan yang tak bisa dijelaskan. China berupa kekayaan atau pengeluaran yang melebihi dari pendapatan.

³⁴Alvon dkk, Op.cit, hlm. 22

Selain itu dalam bab tersebut juga membahas mengenai 3 konvensi yang mengatur mengenai *illicit enrichment*. Dalam UNCAC subjeknya adalah pegawai publik secara umum sedangkan objeknya adalah *lawful income*, pendapatan baik dari gaji maupun diluar gaji (pendapatan yang sah setelah laporan kepada negara). IACAC subjeknya adalah pegawai pemerintah, lebih sempit pengertiannya dibanding UNCAC sedangkan objeknya adalah *lawfull earning*, berupa gaji (sebelum pelaporan kekayaan). AUCPCC subjeknya adalah pejabat publik atau setiap orang lainnya bisa dibilang subjek ini yang paling luas karena mencakup bukan hanya pejabat publik tapi juga orang lain dalam arti luas, sedangkan objeknya adalah *income*, pendapatannya berupa gaji maupun bukan gaji (sebelum pelaporan). Dari ketiga perbandingan tersebut diharapkan Indonesia nantinya dapat mengambil poin-poin penting untuk membentuk suatu peraturan mengenai *illicit enrichment* yang sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia

Menurut Yunus Husein yang pada saat itu (2013) menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam diskusi yang dilakukan di ICW berpendapat mengenai tiga hal yang perlu dibuat guna penyusunan pengaturan *illicit enrichment*, Pertama, tujuan regulasi *illicit enrichment* untuk mencegah dan memberantas korupsi serta menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindak pidana berat. Kedua, pembuktian yang digunakan dalam pengaturan *illicit enrichment* adalah pembuktian terbalik kepada terdakwa. Menurutnya, jika terdakwa tak dapat membuktikan asal-usul aset yang dimiliki maka harta tersebut

dapat dirampas negara. Ketiga perumusan delik.³⁵ Apabila menggunakan delik formal maka akan lebih mudah pembuktiannya karena tidak diperlukan adanya akibat, sedangkan bila menggunakan delik materiil maka akan lebih sulit karena harus membuktikan akibat yang timbul dari *illicit enrichment*.

Rumusan delik terdiri dari tiga komponen.³⁶

1. Subyek (*normadressaat*) atau pelaku delik

Pada umumnya, subyek delik “barangsiapa” (*whoever*) atau setiap orang (any person). Kadang-kadang subyek suatu delik terbatas pada kualitas seseorang, seperti Tabib yang... (*de geneeskundige*) Pasal 267 KUHP; “Pegawai Negeri (*Ambtenaar*)” Pasal 415 KUHP; “seorang ibu...” (*moeder*) Pasal 341 KUHP; “Saudagar...” (*De koopman*) Pasal 396 KUHP; “Panglima tentara” (*Bevelhebber*) Pasal 413 KUHP; dan sebagainya.

2. Rumusan delik atau definisi delik (*delictsomschrijving*), yang terdiri atas bagian inti delik (*delictsbestanddelen*).
3. Sanksi yang terdiri atas pidana (*straf/punishment*) dan tindakan (*maatregel/measure*)

Berdasarkan tiga komponen tersebut maka perumusan delik *illicit enrichment* harus memenuhi 3 komponen tersebut.

³⁵ Rofiq Hidayat, *Perlunya aturan illicit enrichment untuk cegah korupsi (online)*, 2013, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5273ab9aace4d/perlunya-aturan-illicit-enrichment-untuk-cegah-korupsi>, dilihat tanggal 25 Juni 2017

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta:P.T Sofmedia, 2015), Hlm 125-126

Dalam *illicit enrichment* berdasarkan UNCAC subyeknya adalah pejabat publik. berdasarkan Undang-Undang RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 Angka (8)³⁷. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pejabat publik yang dimaksud disini sama dengan pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan begitu pejabat yang menjalankan perusahaan publik seperti BUMN yang memperoleh dana dari APBN dapat dikenakan *Illicit enrichment*. Kenapa hanya pejabat publik bukan semua orang? Argumennya adalah bahwa pejabat publik harus mempertahankan Kode etik dan etika yang menempatkan mereka di atas warga normal. dalam *illicit enrichment* penuntut dibebaskan dari beban pembuktian penuh karena tidak perlu secara langsung menambahkan bukti adanya korupsi namun menggeser beban pembuktian kepada terdakwa yang mengharuskannya untuk membuktikan apakah kekayaan tersebut diperoleh secara sah atau tidak.

Inti dari *illicit enrichment* itu adalah adanya peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar atau signifikan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat negara yang tidak dapat dijelaskan apakah harta tersebut didapat dari penghasilan yang sah atau tidak, oleh karena itu pejabat tersebut harus membuktikan asal usul dari harta kekayaan tersebut. Jika harta tersebut tidak dapat dijelaskan asal usulnya maka Negara dapat mengambil harta tersebut. Sebelumnya telah dijelaskan makna signifikan yang mendapat perdebatan karena dinilai tidak dapat diukur, namun dapat diambil makna bahwa signifikan disini berarti tidak wajar atau melebihi dari penghasilannya seharusnya. Selanjutnya untuk menghitung

³⁷ Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

peningkatan kekayaan yang signifikan atau tidak dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, antara lain ialah:³⁸

- a. Kekayaan yang telah dilaporkan sebelum ia menjabat sebagai pejabat publik
- b. Kekayaan tersebut baik gaji maupun bukan gaji
- c. Perhitungan kekayaan dihitung setelah ia melaporkan kekayaannya dan dihitung selama masa jabatannya

LHKPN menjadi pintu awal untuk memeriksa harta kekayaan negara pada sebelum, saat dan setelah menjabat.

Untuk sanksi yang diberikan, merujuk pada beberapa negara yang telah mengatur mengenai *illicit enrichment* sebagaimana yang telah disebutkan dalam kajian pustaka, ada beberapa sanksi yang digunakan berupa penjara, kurungan, denda dan sanksi administratif berupa pemecatan, dilarang untuk menjabat suatu jabatan tertentu dan pencabutan hak pemilu. Sebagai upaya penjeratan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku haruslah diberikan secara kumulatif berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi-sanksi tersebut bisa menjadi acuan bagi formulasi pengaturan *illicit enrichment* dimasa akan datang. Pengembalian aset atau perampasan aset menjadi salah satu daya tarik *illicit enrichment* guna mengembalikan kerugian negara atas tindak pidana korupsi. Berikut ini adalah

³⁸ Milda Istiqomah, op.cit, hlm 84

landasan moral justifikasi pengembalian aset oleh negara yang dikemukakan oleh Michael Levi yaitu:³⁹

1. Alasan pencegahan (*prohylatic*), yakni agar pelaku tindak pidana dapat dicegah untuk mengendalikan aset yang didapat dengan cara tidak sah, agar tidak melakukan tindak pidana lain
2. Alasan kepatutan (*propriety*), yakni dikarenakan aset yang didapat dari cara tidak sah tersebut tidak pantas untuk dimiliki pelaku tindak pidana tersebut
3. Alasan prioritas/mendahului, negara memiliki prioritas atas aset yang didapat dari cara yang tidak sah dibandingkan hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Prioritas disini adalah untuk menuntut aset tersebut dikembalikan kepada negara.
4. Alasan kepemilikan (*proprietary*), negara memiliki kepentingan sebagai pemilik aset karena aset tersebut diperoleh dengan cara tidak sah.

Sedangkan hukum acaranya sendiri perlu dilakukan perumusan secara teliti mengingat adanya pembuktian terbalik dalam *illicit enrichment* sehingga hukum acaranya harus diatur lebih rinci agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya nanti. Selain itu yang tidak kalah penting juga mengatur mengenai instansi mana yang berhak untuk melakukan penyelidikan penyidikan sampai pada tahap penuntutan nantinya. Pengaturan lebih jelas mengenai LHKPN juga tidak boleh diabaikan mengingat bahwa LHKPN bisa menjadi pintu masuk

³⁹ Purwaning M. yanuar, op.cit, Hlm 101-102

untuk melaksanakan *illicit enrichment*. Haruslah ada sanksi bisa berupa sanksi administratif bagi pejabat publik yang tidak melaporkan kekayaannya atau bahkan yang mencurangi LHKPN.

Untuk pengaturan mengenai *illicit enrichment* ini bisa dilakukan dengan memperbaharui Undang-Undang Tipikor atau dengan membentuk undang-undang khusus terkait *illicit enrichment* tersendiri. Salah satu kelebihan apabila dibentuk undang-undang khusus tentang *illicit enrichment* yaitu hukum materiil dan hukum formal dari *illicit enrichment* dapat diatur secara rinci.

Berdasarkan unsur-unsur *illicit enrichment*, perbandingan dengan beberapa negara serta mempertimbangkan RUU tipikor dan RUU Perampasan aset berikut ini penulis berikan contoh rumusan *illicit enrichment* yang sekiranya bisa digunakan di Indonesia:

Illicit enrichment

- (1) Setiap pejabat publik yang melakukan perbuatan memperkaya diri, dalam arti, adanya penambahan besar kekayaan (secara signifikan) pejabat publik berupa uang atau aset yang tidak dapat dijelaskan/dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah
- (2) Aset yang dimaksud pada ayat (1) merupakan aset tidak wajar yang dihitung melalui total kekayaan dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah.
- (3) Setiap pejabat publik wajib membuktikan asal usul dari aset tidak wajar yang dimiliki
- (4) Perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat diancam hukuman pidana paling singkat... dan paling lama...

- (5) Apabila tidak dapat membuktikan asal-usul perolehan asetnya melalui perolehan yang sah maka negara dapat mengambil aset tersebut.
- (6) Pidana Tambahan berupa pemecatan dan pelarangan menjabat suatu jabatan tertentu

Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kelemahan dalam tahap formulasi (*in abstracto*) merupakan kelemahan strategis bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi (*in concret*).⁴⁰ Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa UU Tipikor saat ini belum mengakomodir pengembalian kerugian negara akibat korupsi dan juga perampasan aset sehingga belum dapat memberikan optimalisasi dalam pengembalian kerugian negara secara optimal. Sehingga diperlukan formulasi baru guna mengoptimalkan pengembalian kerugian negara, *illicit enrichment* merupakan suatu upaya baru untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara terutama melalui perampasan aset.

Meskipun *illicit enrichment* sebenarnya sudah sering diperdebatkan untuk segera dibentuk peraturannya banyak pihak yang menyangsikan akankah peraturan tersebut bisa diimplementasikan dengan baik di Indonesia karena lembaga yang ada dianggap belum mampu menjalankannya. Padahal yang terpenting adalah adanya kepastian hukum terlebih dahulu atas *illicit enrichment*

⁴⁰ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm 172-173

dalam peraturan perundangan di Indonesia dan untuk lembaga pendukung serta hal-hal lain dapat dilakukan secara bertahap untuk memperbaikinya.

Selanjutnya untuk menguatkan aturan ini maka harus dibuat kewenangan-kewenangan penting untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan *illicit enrichment* terkait dengan kemudahan dalam mengakses informasi tentang pengelolaan aset yang dimiliki pejabat publik. perbaikan sistem pendataan baik LHKPN, pajak, sistem administrasi kependudukan, sistem administrasi pertanahan, administrasi kendaraan bermotor serta administrasi dan database transaksi keuangan juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan *illicit enrichment*.⁴¹

Selain itu seperti dijelaskan sebelumnya adanya hukum acara terkait dengan *illicit enrichment* sangatlah penting mengingat bahwa hal ini baru dalam sistem hukum Indonesia, terlebih dengan adanya sistem pembuktian terbalik dan penghitungan aset yang membutuhkan pengaturan lebih rinci bagaimana nanti proses sehingga memudahkan pelaksanaannya. tidak lupa dibutuhkan suatu badan untuk mengelola aset yang telah dirampas tersebut agar aset yang telah disita tersebut jelas pengelolaannya guna kepentingan masyarakat.

Korupsi berbeda dengan tindak pidana lain, pemberantasan dan penindakannya harus berbeda dengan tindak pidana lain dikarenakan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Namun perlu diingat bahwa pembedaan ini bukanlah suatu diskriminasi melainkan salah satu upaya untuk mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁴¹ Alvon dkk, op.cit, Hlm 58

BAB IV

PENUTUP

1.1.Kesimpulan

1. Ide dasar dari *illicit enrichment* dapat ditelaah melalui 3 landasan, yaitu landasan yuridis, filosofis dan sosiologis :

Landasan yuridis dari *illicit enrichment* terdapat dalam Pasal 20 UNCAC yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006 namun Undang-Undang tersebut masih bersifat umum dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengimplementasikannya. Sehingga terjadi kekosongan hukum terhadap *illicit enrichment*.

Landasan filosofis dari *illicit enrichment*, bahwa tindak pidana korupsi telah melanggar nilai-nilai yang ada dalam UUD NRI 1945, Pancasila dan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat

Landasan sosilogis dari *illicit enrichment*, bahwa tindak pidana korupsi merugikan negara, memiskinkan rakyat dan mengurangi kepercayaan rakyat kepada negara terutama pejabat publik.

Intinya, lahirnya *illicit enrichment* merupakan suatu upaya guna mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. *Illicit Enrichment* perlu dimasukkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi karena *illicit enrichment* memiliki banyak keunggulan sebagai upaya pemberantasan korupsi yang terutama adalah dalam rangka mengembalikan kerugian negara.

3. Belum adanya pengaturan mengenai *illicit enrichment* berakibat adanya kekosongan hukum, maka dibutuhkan suatu pengaturan hukum terkait *illicit enrichment*. Berikut ini adalah formulasi hukum yang direkomendasikan penulis:

Illicit enrichment

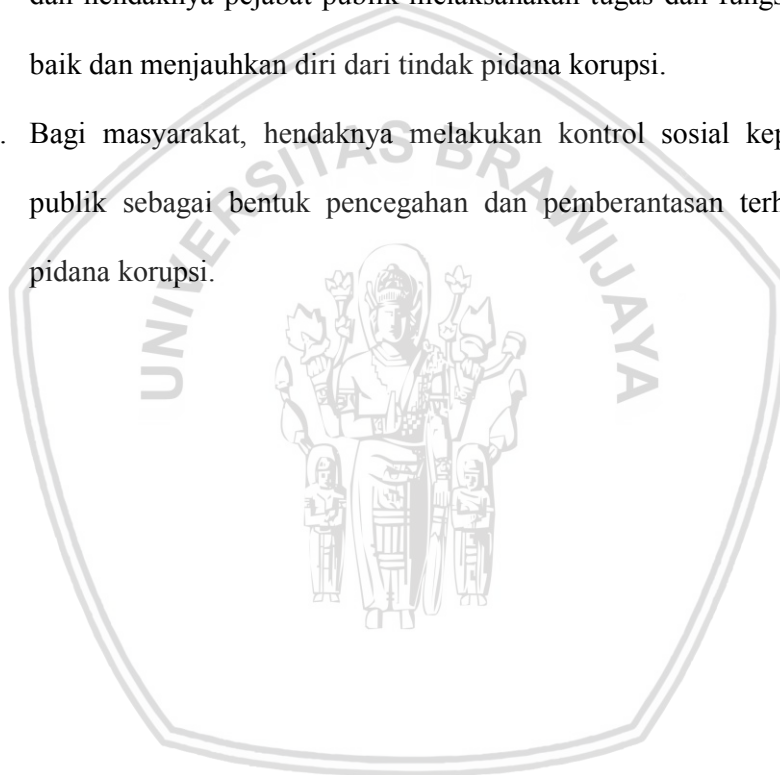
- (1) Setiap pejabat publik yang melakukan perbuatan memperkaya diri, dalam arti, adanya penambahan besar kekayaan (secara signifikan) pejabat publik berupa uang atau aset yang tidak dapat dijelaskan/dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah
- (2) Aset yang dimaksud pada ayat (1) merupakan aset tidak wajar yang dihitung melalui total kekayaan dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah.
- (3) Setiap pejabat publik wajib membuktikan asal usul dari aset tidak wajar yang dimiliki
- (4) Perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat diancam hukuman pidana penjara paling singkat... dan paling lama...
- (5) Apabila tidak dapat membuktikan asal-usul perolehan asetnya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas oleh negara
- (6) Pidana Tambahan berupa pemecatan dan pelarangan menjabat suatu jabatan tertentu

1.2.Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan segera membentuk pengaturan *illicit enrichment* mengingat bahwa *illicit enrichment* merupakan suatu upaya baru dalam pemberantasan korupsi terlebih dalam hal perampasan aset

guna mengembalikan kerugian dan aset negara yang telah dikorupsi. Selanjutnya apabila pengaturan *illicit enricment* telah terbentuk hendaknya faktor pendukung segera diperbaiki secara bertahap baik dari segi kelembagaan, adminstrasi dan lain hal sebagainya yang mendukung proses pelaksanaan *illicit enrichment*.

2. Bagi pejabat publik, hendaknya melaporkan secara berkala harta kekayaan yang dimiliki guna menghindari adanya kecurigaan harta yang tidak wajar dan hendaknya pejabat publik melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi.
3. Bagi masyarakat, hendaknya melakukan kontrol sosial kepada pejabat publik sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.



Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali, *Menyibak Tabir Hukum*, Jakarta:Gunung Agung, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran.Hukum Pidana.Bagian I*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Ainul Samsyu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2016
- Alvon dkk, *Implementasi.dan.Pengatura. Illicit.Enrichment. (Peningkatan. kekayaan.secara.tidak.sah) di Indonesia*, Jakarta Selatan:Indonesia Corruption Watch, 2014
- Andi Hamzah, *Delik-delik.Tersebar.di.Luar.KUHP.dengan.Komentar*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1995
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta:P.T Sofmedia, 2015
- Aziz Syamsuddin, *Tindak.Pidana.Khusus*, Jakarta:..Sinar Grafika, 2011
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:Mandar Maju, 2008
- Bambang sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997
- Bambang Waluyu, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang:Ghalia Indonesia, 1996
- Barda Nawawi.Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2016
- Bernard L Tanya, *Teori Hukum, Startegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, Surabaya:CV Kita, 2007
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu.Hukum dan Tata.Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1983
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2010
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013

- Evi Hartanti, ***Tindak Pidana.Korupsi***, Jakarta:Sinar.Grafika, 2012
- Dwidja Priyatno, ***Sistem.Pelaksanaan Pidana.Penjara Di.Indonesia***, Bandung:Refika Aditama, 2006
- ICW, ***Usulan Draft Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Versi Masyarakat “RUU Tindak Pidana Korupsi”***, Jakarta:ICW, 2015
- Igm Nurdjana, ***Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Perspektif Tegaknya Keadailan Melawan Mafia Hukum)***, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010
- Indriyanto Seno Adji, ***Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian***, Jakarta:Prof. Oemar Seno Adji, S.H. dan Rekan, 2006
- J.G Starke, ***Pengantar Hukum Internasional***, terjemahan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta:Sinar Grafika, 2001
- Jonny Ibrahim, ***Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, Malang :Bayumedia Publishing, 2011
- Kristian dan Yopi Gunawan, ***Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)***, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Luhut M.P Pangaribuan, ***Hukum Pidana Khusus***, Jakarta:Pustaka Kemang, 2016
- Mahrus Ali, ***Hukum Pidana Korupsi***, Yogyakarta:UIN Press, 2016
- M. Ali Zaidan, ***Menuju Pembaharuan Hukum Pidana***, Jakarta:Sinar Grafika, 2015
- Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, ***Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum***, Jakarta:Pradya Paramita, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi arief, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***,Bandung:Alumni, 1992
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum Cetakan ke 11***, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Purwaning M. yanuar, ***Pengembalian Aset Hasil Korupsi***, Bandung;Alumni, 2007
- Riduan Syahrani, ***Rangkuman Intisari Ilmu Hukum***, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999

- Romli Atmasamita, *Pemikiran Romli Atmasasmita tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Pnemitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005
- Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta, 2012
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum Dan Politik*, Jakarta: Eresco, 1991
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Karya Ilmiah

- La Sina, Dampak, dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia, Volume 26 No 1, Jurnal Hukum Pro Justitia, Universitas Katolik Parahyangan, 2008
- Herry Susilowati, *Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Vol 2, Research Report - Humanities and Social Science, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2012

- Jamin Ginting, *Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia*, Vol 11 No 3, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Soedirman, Purwokerto, 2011
- Marfuatul Latifah, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia*, volume 6 No 1, Negara Hukum, P3DI Bidang Hukum, 2015
- Milda Istiqomah, *Kebijakan Formulasi Pegaturan "Illicit Enrichment" Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Volume 23 No 1, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016
- Susan Rose-Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat, dan Reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

- *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
- *United Nations Convention Against Corruption, 2003*
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3851
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150
- Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4250
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)* Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620

- Undang-Undang RI No 14 Tahun 2008 tentang ***Keterbukaan Informasi Publik***, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4846

Internet

- Humas KPK, 2014, ***Dua Syarat Agar LHKPN Efektif Cegah Korupsi*** *(online)*, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2313-dua-syarat-agar-lhkpn-efektif-cegah-korupsi>, (25 Juni 2017)
- <http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/enrichment> (Online, tanggal 23 Mei 2017)
- <https://www.kamusbesar.com/unjust-enrichment%2C-doctrine-of> (Online, tanggal 23 Mei 2017)
- Rofiq Hidayat, 2013, ***Perlunya aturan illicit enrichment untuk cegah korupsi*** *(online)*, 2013, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5273ab9aace4d/perlunya-aturan-illicit-enrichment-untuk-cegah-korupsi>, dilihat tanggal 25 Juni 2017